

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Kajian pustaka menyisipkan komponen moralitas bagi ilmuwan atau peneliti dengan menunjukkan sikap integritas manakala melakukan kegiatan penelitian. Maknanya peneliti yang baik akan selalu mencantumkan literatur-literatur yang dipakai dalam menyusun naskah penelitiannya disajikan dalam bentuk kajian pustaka. Karena pada dasarnya tidak ada sebuah karya tulis ilmiah yang berdiri sendiri terlepas dari pengaruh penelitian terdahulu. Selalu ada celah (*gap*) dalam penelitian terdahulu yang dapat ditempati peneliti lainnya dengan kajian terbaru.

Maka dari itu signifikansi kajian pustaka dalam kegiatan penelitian untuk memberikan informasi kepada pembaca hasil karya tulis ilmiah lainnya yang mempunyai pertautan erat dengan penelitian yang tengah dilaksanakan dan dapat menyediakan kerangka berpikir untuk menggemukakan pentingnya penelitian yang sedang dilaksanakan, seraya membandingkan hasil-hasil temuan dalam penelitian dengan penemuan-penemuan penelitian lainnya (Creswell, 2014, pp. 27–28). Kegiatan ini dilakukan agar terhindar dari segala bentuk plagiarisme. Adapun literatur-literatur yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal penelitian, dan beberapa bahan pustaka pendukung lainnya yang dijadikan oleh penulis sebagai rujukan pembanding, dan sebagai instrumen pembantu dalam rangka menyusun penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia dengan judul **“Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi”** ditulis oleh Rodon Pedrason pada tahun 2021. Dalam tulisan ini menjabarkan ulasan mengenai nilai-nilai strategis kawasan Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostategis menjadi variabel utama yang memengaruhi presensi kekuatan-kekuatan yang teridentifikasi sebagai negara intra kawasan untuk meningkatkan intensitas interaksi. Tersajinya fenomena tersebut menjadi sinyal kuat bahwa daya tawar keunggulan geografis menjadikan banyak negara menaruh kepentingan di kawasan yang diikuti oleh kalkulasi strategi untuk meraihnya. Artikel ini eksplisit menjelaskan keunggulan-keunggulan geografis yang dimiliki oleh Indo-Pasifik dapat menjadi kunci untuk menjamin nasib keberlangsungan sebuah negara dengan menyediakan sebuah ruang maritim untuk dimanfaatkan menjadi jalur pelayaran distribusi energi bagi negara-negara industri. Oleh sebab itu, tulisan dalam artikel ilmiah ini memberi interpretasi bahwasanya konsep *struggle of interest* dapat memberikan eksplanasi logis dalam memahami dinamika kawasan Indo-Pasifik karena banyaknya benturan kepentingan antar negara.

Kompleksitas kawasan dalam tulisan ini digambarkan dalam desain rivalitas antar negara yang memiliki kedekatan wilayah dengan kawasan Indo-Pasifik dan menjadikan kawasan tersebut sebagai objek kebijakan geopolitik yang memproduksi konfrontasi antar kekuatan. Negara-negara demokrasi Indo-Pasifik seperti Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat, mengkrystalkan konsep Indo-Pasifik dalam dokumen-dokumen kenegaraan sebagai pijakan aktivitas politik luar negeri di kawasan tersebut. Tidak luput dari perhatian kehadiran Tiongkok yang juga

menyimpan kepentingan strategis yang bergantung pada akses terhadap zona maritim Indo-Pasifik. Keterlibatan banyak negara melalui implementasi kebijakan luar negeri untuk ikut serta dalam membahas isu-isu dalam konteks Indo-Pasifik telah memberikan sebuah indikasi kuat bahwa tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah strategis, melainkan juga sebagai bentuk evolusi Indo-Pasifik sebagai ruang arena kompetisi distribusi bagi kekuatan antarnegara.

Kedua, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal *China International Strategy* berjudul **“The Evolution of the ‘Quad’: Driving Forces, Impacts, and Prospects”** ditulis oleh Zongyou Wei pada tahun 2022. Artikel ini menjelaskan secara konstruktif mengenai dinamika kemunculan dan evolusi dari platform dialogis antarnegara yang dapat memfasilitasi kerja sama multilateral bernama *Quadrilateral Security Dialogue*. *Quad* awal kemunculannya merupakan bagian integral dari operasi kemanusiaan negara-negara demokrasi Indo-Pasifik dalam merespons bencana alam dan kemudian memperluas lingkup isu yang dibahas dengan berfokus pada aspek kemaritiman. Namun, intensitas diplomasi dalam platform kerja sama tersebut cenderung tidak stabil berdampak langsung pada pudarnya eksistensi *Quad* selama satu dekade.

Hingga pada tahun 2017 muncul iterasi mengenai ide untuk mengaktifkan kembali kinerja *Quad* yang diringi introduksi visi kawasan oleh Amerika Serikat diadopsi langsung dari perspektif Jepang terhadap Indo-Pasifik dinamakan dengan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Prinsip dan nilai yang terkandung dalam FOIP mengacu pada nilai-nilai kebebasan dan keterbukaan. Prinsip dan nilai tersebut terusdi promosikan agar dapat diterima secara universal oleh negara-negara kawasan dan menjadi pedoman dalam berinteraksi. Akan tetapi, kemunculan kembali

Quad dan formulasi mengenai visi kawasan dilatarbelakangi oleh ide untuk menghadapi geliat masif kebangkitan Tiongkok. Oleh karena itu, platform dialogis tersebut telah berevolusi menjadi konsolidasi kekuatan negara demokrasi untuk menghadapi kekuatan Tiongkok. Alhasil kerja sama dan inisiatif yang dirancang dalam forum diskusi *Quad* diarahkan untuk untuk melawan kekuatan revisionis tersebut.

Ketiga, artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Strategi dan Kampanye Militer berjudul “**Strategic Environment in Indo-Pacific, China-US Threat and Opportunities**” ditulis oleh Saqib Athar Dil pada tahun 2022. Tulisan ini secara garis besar memuat sebuah analisa logis terhadap realitas kawasan Indo-Pasifik melalui kaca mata politik internasional. Tema sentral yang dibahas dalam tulisan ini mengenai pembentukan Indo-Pasifik oleh dua kekuatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sama-sama mempunyai prioritas kepentingan. Artinya, Indo-Pasifik menjadi panggung bagi keduanya untuk saling mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional dapat ditindak lanjuti oleh kalkulasi strategi dan kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu, artikel ini mengulas strategi dan kebijakan yang dilancarkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat yang pada akhirnya terlahir konflik karena kepentingan keduanya saling mengganggu. Namun pada sisi lainnya, kehadiran keduanya di Indo-Pasifik sesungguhnya melahirkan peluang yang berdampak positif dalam menghadapi isu-isu tertentu yang melingkupi Indo-Pasifik.

Keempat, tesis berjudul “**China’s Rise to Power: An Examination of Domestic, Regional, and Global Impact**” ditulis oleh Melissa Ackerman pada tahun 2014. Tesis ini mendeskripsikan fenomena hubungan internasional di dunia kontemporer mengenai kekuatan negara

yang sedang meningkat. Tesis ini memuat pandangan holistik mengenai fenomena internasional kebangkitan kekuatan Tiongkok. Tesis ini dimulai oleh ulasan kritis mengenai kebangkitan Tiongkok dengan mengkorelasikan stabilitas tatanan domestik negara Tiongkok dengan kebangkitannya menuju kekuatan utama global yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebangkitannya masih bersifat labil karena dipengaruhi faktor kondisi faktual domestik yang diwarnai problem dimensi *human security* (keamanan manusia) yang dapat mengundang konflik internal. Permasalahan-permasalahan domestik yang menghinggapi tubuh negara dapat menjadi patologi kebangkitan Tiongkok dan akan secara otomatis mendekonstruksi pencapaian-pencapaian progresif.

Kemudian ulasan lanjutan tesis ini membahas mengenai efek kebangkitan Tiongkok terhadap dinamika lingkungan regional dan global. dalam konteks regional, tesis ini mengamati dampak distribusi kekuatan Tiongkok terhadap kawasan ASEAN yang memproduksi model interaksi bervariasi. Konsep *balancing*, *bandwagoning*, dan *hedging* memberikan deskripsi terhadap timbulnya model interaksi di kawasan dengan mengambil sampel tiga negara ASEAN mencakup hubungan interaksi Tiongkok-Myanmar, Tiongkok-Filipina, dan Tiongkok Vietnam. Sedangkan dalam lingkungan strategis global, konteks pembahasannya diarahkan pada ulasan rivalitas terbuka antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di zona maritim Laut Tiongkok Selatan dalam perspektif dilema keamanan. Artinya, pendekatan strategis Tiongkok dengan peningkatan kapabilitas militer juga diikuti oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan ekstra kawasan untuk ikut serta dalam konflik maritim tersebut.

Kelima, tesis berjudul **“The U.S-China ‘Rivalry’: The Impact of The Rapid Economic Growth of China on the American Hegemony”** yang ditulis oleh Benaros Omayma Fatima Zohra pada tahun 2019. Tesis ini menyajikan kajian ilmiah mengenai siklus klasik sering terulang dalam hubungan internasional ketika kekuatan besar dan kekuatan kecil yang meningkat terlibat dalam persaingan dengan berfokus pada topik perseteruan antara kekuatan Tiongkok yang sedang meningkat dengan Amerika Serikat. Tesis ini diawali dengan uraian mengenai variabel-variabel yang memengaruhi peningkatan kekuatan kedua negara tersebut sehingga dapat bertransformasi menjadi kekuatan dunia. Pada intinya, keduanya bertransformasi menjadi kekuatan dunia dengan diawali oleh kebangkitan ekonomi, khusus untuk Amerika Serikat didukung oleh fitur geografis.

Pasca mengulas variabel-variabel yang memengaruhi kebangkitan kedua negara, tesis ini menjelaskan secara eksplisit bahwasanya kebangkitan ekonomi Tiongkok dan peningkatan pengaruh globalnya telah menjadi tekanan sistemis bagi Amerika Serikat sebagai hegemon tunggal dunia. Kemudian tesis ini memahami fenomena tersebut dengan konsep *Thucydides Trap*. Konsep tersebut memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik dapat timbul akibat adanya geseran kekuasaan di kancah internasional. Konflik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok merupakan bukti empiris konsep *Thucydides Trap* di dunia kontemporer yang disajikan oleh adanya rivalitas antarnegara.

Tabel 2.1 Literatur Reviu

Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1. Indo-Pasifik	Rodon	MengkajiIndo-	Penelitian yang

<p>dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi</p>	<p>Pedrason.</p>	<p>Pasifik sebagai entitas kawasan yang menjadi objek kebijakan luar negeri aktor negara .</p>	<p>dilakukan penulis mempersempit cakupan aktor negara dengan berfokus pada keterlibatan Tiongkok dan Amerika Serikat di Indo-Pasifik yang dijadikan preferensi kebijakan oleh kedua kekuatan tersebut.</p>
<p>2. <i>The Evolution of the 'Quad': Driving Forces, Impacts, and Prospects.</i></p>	<p>Zongyou wei.</p>	<p>Mengulas dinamika peristiwa yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik dalam konteks rivalitas kekuatan antarnegara dengan indikasi adanya aliansi kekuatan Amerika Serikat melawan entitas kekuatan tertentu yang diwakilkan</p>	<p>Tulisan dalam aritkel ilmiah lebih menaruh perhatian variabel dinamika kemunculan dan evolusi <i>Quad</i>, serta dampaknya terhadap kawasan yang menimbulkan konflik. Sementara penelitian penulis berfokus pada kebangkitan Tiongkok menjadi</p>

		Tiongkok.	variabel yang menimbulkan eskalasi konflik di Indo-Pasifik, khususnya dengan kekuatan Amerika Serikat.
3. <i>Strategic Environment in Indo-Pacific, China-US Threat and Opportunities.</i>	Saqib Athar Dil.	Memberikan pembahasan mengenai anatomi konflik kepentingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di Indo-pasifik.	Dalam artikel tidak mengulas secara konstruktif kebangkitan Tiongkok. Sedangkan dalam penelitian penulis kebangkitan Tiongkok menjadi variabel yang mendeskripsikan dan menjelaskan penyebab konflik kepentingan nasional dengan Amerika Serikat di Indo-Pasifik.

4. <i>China's Rise to Power: An Examination of Domestic, Regional, and Global Impact.</i>	Melissa Ackerman.	Mengkaji kebangkitan Tiongkok dan dampaknya yang menimbulkan konfrontasi langsung menghadapi kekuatan Amerika Serikat di Indo-Pasifik.	Di dalam tesis mengulas kebangkitan Tiongkok secara kritis dengan mengidentifikasi masalah domestik Tiongkok. Selain itu, tesis ini mengulas dampak kebangkitan Tiongkok secara holistik mencakup lingkungan strategis regional dan global. Sementara dalam penelitian penulis membatasi dampak kebangkitan Tiongkok pada

			lingkup lingkungan strategis regional Indo-Pasifik.
5. <i>The U.S-China "Rivalry": The Impact of The Rapid Economic Growth of China on the American Hegemony.</i>	Benaros Omayma Fatima Zohra.	Membahas kebangkitan Tiongkok dengan penguatan ekonominya yang dampaknya terhadap status kedudukan Amerika Serikat sebagai negara hegemon dan adikuasa.	Dalam tesis tidak dijelaskan kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik. Sementara dalam penelitian penulis mengulas kepentingan kedua kekuatan tersebut di Indo-Pasifik dipengaruhi oleh variabel kebangkitan Tiongkok yang melahirkan eskalasi konflik.

2.2 Kerangka Teoretis

Semua disiplin akademis didedikasikan untuk memahami dan menjelaskan sejumlah aspek dunia, meskipun beberapa diantaranya melakukannya dengan mekanisme berbeda. Perihal ini bisa terlaksana dengan bantuan seperangkat teori yang diformulasikan sebagai jawaban terhadap persoalan dan pertanyaan spesifik yang timbul dari pokok bahasannya (Lawson, 2015). Hubungan internasional mengimplikasikan studi mengenai sejumlah besar fakta tentang dunia. Namun deretan fakta hanya relevan bila terdapat kerangka (*framework*) untuk menjelaskannya. Sebagai ilustrasinya, fakta laksana sebuah karung yang bilamana tidak akan memiliki kapasitas berdiri tegak sebelum selama meletakan sesuatu di dalamnya. Perumpamaan sederhana ini mengimplisitkan petunjuk bahwa tanpa adanya teori, konsekuensi logisnya akumulasi fakta yang tersirat dalam deretan fenomena akan bersifat abstrak. Maknanya, subjek akan kesulitan memahami hubungan internasional secara holistik tanpa adanya sebuah teori. Jadi, kedudukan teori berperan sentral selaku kerangka yang dapat memudahkan subjek dalam memahami fakta yang mengandung makna simbolik dibalik kontinum kompleksitas fenomena dalam hubungan internasional. Dalam pengertian sederhananya, baik dalam ilmu sosial maupun alam, teori pada dasarnya versi sederhana dari realitas yang kompleks (Daddow, 2017). Sebagaimana yang diungkapkan oleh kelompok saintifik, bahwa suatu lompatan besar untuk beralih dari spekulasi kausal berdasarkan pengujian empiris ke konstruksi formulasi teoretis yang memungkinkan seseorang menyusun fakta-fakta yang baru diamati melalui lensa teoretis. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, maka diperlukan penyederhanaan (teori ilmiah) (Waltz, 2010, p. 10).

Pada konteks dunia Barat, secara genealogis konsep teori mempunyai asal-usul dan makna ganda yang terbagi dalam dua tradisi berbeda. *Pertama*, teori sebagai pengetahuan kontemplatif, yang diambil dari ide-ide atau dari tatanan dasar dunia yang linear dengan filsafat. Dalam hal ini, teori tidak hanya berbeda dari aspek praktis atau tindakan, melainkan juga dari aspek pengetahuan oleh karena digerakkan oleh antusiasme kehendak untuk mengetahui agar dapat memprediksi dan dengan demikian mampu bertindak. Maka, dalam tradisi ini tolak ukur dari penilaian terhadap tingkatan tertinggi dari sebuah teori adalah dipengaruhi oleh tingkat abstraksinya yang tinggi dan tingkat kepraktisan yang rendah. *Kedua*, teori yang dipahami secara saintifik. Dalam pemahaman ini, teori diartikan sebagai hipotetis, sistem deduktif yang terdiri dari atas sejumlah hipotesis yang masing-masing konsepnya didefinisikan secara presisi dan hubungan antar konsep dikonfigurasi dalam bentuk hubungan matematis. Elaborasi dari sistem dimulai dengan konseptualisasi realitas yang diobservasi, ditindaklanjuti dengan pembentukan aksioma atau hubungan-hubungan abstrak pada tingkat tinggi yang menuntun sistem dan memungkinkan ilmuwan untuk menemukan kembali melalui deduksi, baik formula yang dijelaskan dengan baik maupun fakta-fakta yang dipersepsi melalui instrumen sehingga teori dapat tervalidasi (Aron, 1967, p. 186).

Dalam konteks hubungan internasional, distingsi tradisi teoretis menjadi realitas akademis yang dapat diidentifikasi secara filosofis dalam segala aspek. Namun secara pastinya, seringkali dikatakan dalam diskursus masa kini bahwa hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu porosnya Barat sentris, dan sebagian besar teori arus utama dianggap hanya sebuah abstraksi dari sejarah dunia Barat. Lebih jelasnya,

berarti bahwa pilar fundamental hubungan internasional sebagai subjek kajian berorientasi pada perspektif Barat sebagai model mengenai apa yang dianggap normal dalam sistem internasional. Sulit untuk mengelak bahwa sebagian besar buku teks hubungan internasional jarang sekali bahkan tidak ada sama sekali isi ulasannya dalam konteks perspektif dunia non-Barat. Bahkan nilai kuantitas penerbitan akademis dimonopoli oleh Barat dengan lebih dari 80% publikasi teks subjek hubungan internasional dalam rentang waktu 1970-2005 berasal dari akademisi yang berbasis di Amerika Serikat dan negara Barat lainnya (Tickner, 2013). Akumulasi fakta ini menimbulkan pandangan lebih kritis bahwa teori hubungan internasional dinilai sebagai konfigurasi parokialisme karena berupaya menerapkan nilai-nilai dan mekanisme berpikir Barat dalam memahami dunia yang lain (*the other*) dan cenderung mengilustrasikan dunia yang lain tersebut sebagai subjek subordinat dan inferior. Klaim tersebut tidak hanya diaplikasikan dalam aliran pemikiran arus utama (realisme dan liberalisme), namun juga pada aliran emansipatoris dan kritis (Marxisme, feminisme, dan *post-modernism*) (Castro, 2011).

Serangkaian fakta, penilaian, dan argumentasi di atas kini telah diterima secara aksiomatik. Karena itu, para sarjana secara praktis telah memetakan tradisi pemikiran Barat yang mendominasi disiplin hubungan internasional. Beberapa diantaranya secara provokatif menilai bahwa tradisi pemikiran Amerika yang positivistik menjadi yang terdepan dan kiblat utama dalam proyek pengembangan disiplin akademik ini. Perdebatan dominasi penulis akademik, teori, dan epistemologi Amerika Serikat dapat dijelajahi jauh sebelum klaim pertama berkaitan dengan Barat sentrisme dalam hubungan internasional yang mulai mencuat pada awal milenium ketiga (awal tahun 2000-an). Semuanya bermula ketika

Stanley Hoffmann mempublikasikan tulisan berjudul *An American Social Science: International Relations*. Dalam artikel ini, Hoffmann mengklaim bahwa progresivitas dari hubungan internasional selaku disiplin ilmu sangat dipengaruhi oleh tradisi Amerika Serikat (Hoffmann, 1977). Tapi, dalam hemat penulis menilai tidak dapat menegasikan aspek historisitas dari kemunculan formal hubungan internasional sebagai sains yang otentik kelahirannya di benua Eropa telah menjadi rahim bagi sejumlah perspektif beserta turunan teorinya yang fungsional dapat dijadikan untuk alat memahami realitas dunia modern yang gagal dipahami oleh para pemikir tradisional. Para sarjana Eropa mulai menentang klaim dominasi Amerika Serikat dan menyatakan argumentasi bahwa setiap negara -tidak hanya Amerika Serikat- mempunyai prospek untuk mengembangkan pendekatan yang berbeda terhadap hubungan internasional (Wemheur-Vogelaar & Peters, 2016, p. 8). Dengan demikian, penulis lebih berpihak pada argumentasi yang tertuang dalam karya tulis KJ Holsti bahwa hubungan internasional didominasi oleh tradisi Amerika dan Inggris (*Anglo-American*) (Holsti, 1987). Masing-masing tradisi secara terminologis dan fungsional memahami konsep teori dengan perspektif yang berbeda.

Tradisi berpikir Inggris (*English School*) atau Eropa kedudukannya dalam hubungan internasional selaku tradisi klasik mewakili kelompok tradisionalis atau klasikis yang secara metodologis dinilai bersifat ortodoks dalam ilmu sosial oleh kelompok pembaharu. Oleh karena karakter realitas sosial-politik dalam politik internasional yang penuh ketidakpastian, penuh dengan kejutan, sulit diprediksi, dan tidak bebas nilai, maka dalam konteks praktik penelitian memerlukan metodologi yang mengandalkan pada literatur sejarah, landasan filosofis yang presisi,

intuisi, dan interpretasi subjektif agar menciptakan karya dengan sekuensi stori yang runut (*good historical sequence*), deskripsi yang meyakinkan (*thick description*), dan interpretasi yang dituntun oleh landasan filosofis yang tepat (Hadiwinata, 2017, p. 63). Sejumlah pakar terkemuka menggunakan pendekatan tersebut sebagai standardisasi dalam upaya teoritis hubungan internasional (Bull, 1966, p. 361). Dalam memahami teori, Barry Buzan selaku pemikir Inggris mendefinisikan teori sebagai segala sesuatu untuk mengelola suatu bidang disiplin studi dengan sistematis, menyusun aneka pertanyaan, serta membentuk seperangkat konsep dan kategori yang korelatif dan koheren (Buzan, 2004, p. 6). Pada konteks definisi ini, terlihat pemahaman teori yang terbilang minimalis hanya mengacu pada proposisi sistematis, perumusan masalah dan rangkaian konsep dan kategori yang koheren, tanpa menuntut adanya eksplanasi logis dan prediksi (Hadiwinata, 2017, p. 21).

Tradisi Amerika (*American School*) memiliki tendensi pada metodologi sangat saintifik atau positivistik untuk dapat aplikatif dalam rumpun ilmu sosial seperti hubungan internasional yang dinilai stagnan. Alhasil teori yang diproduksi oleh tradisi ini dinilai objektif dan memenuhi kualifikasi ilmiah karena dalam praktik riset secara metodologis konstan mengikuti segenap kaidah-kaidah konstruktif yang diadopsi dari ilmu eksakta (ilmu alam) dan ilmu ekonomi. Adapun dalam rangka menunjukkan realitas dalam sistem internasional, kelompok saintifik ini mengikuti mekanisme hitungan variabel, pengujian hipotesis formal dan pembentukan model (Burchill & Linklater, 1996). Oleh sebab itu menurut tradisi pemikiran Amerika atau kelompok positivisme, teori didefinisikan sebagai seperangkat proposisi dan konsep yang mencoba untuk memberi eksplanasi terhadap suatu fenomena dengan

mengidentifikasinya melalui hubungan antar konsep; tujuan utama teori adalah memprediksi fenomena. Teori yang baik berusaha agar dapat menguji sejumlah hipotesis. Dengan menguji hipotesis, teori bisa divalidasi dan disempurnakan, hingga didapati hubungan baru yang memerlukan pengujian lebih lanjut (Mingst & Arreguin-Toft, 2017, pp. 72–73). Dengan demikian, definisi teori dalam tradisi ini melingkupi kekuarangan pemahaman tradisi Inggris terhadap konsep teori karena secara fungsional sebuah teori diharuskan memiliki kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan (*to explain*) logis terhadap sebuah fenomena hubungan internasional dan memprediksi (*to predict*) kemungkinan berulangnya kejadian itu pada masa yang akan datang.

Konkretisasi hasil dari produk akademis kubu tradisi Amerika ataupun tradisi Inggris dalam hubungan internasional hakikatnya membuahakan sejumlah teori arus utama beserta turunannya. Untuk positivis pada dasarnya telah berjasa pada sains hubungan internasional dengan memodifikasi teori arus utama yang lebih saintifik dengan berkisar pada turunan teori dalam perspektif realisme yang kini menjadi program riset kontemporer seperti neorealisme (realisme struktural ofensif dan defensif), realisme neoklasik, realisme *rise and fall* (Elman & Jensen, 2013). Sementara tradisi Inggris, teori yang diciptakan lebih bersifat kontemplatif yang konsekuensinya muatan subjektivitas dari para pakarnya (kalangan diplomat, jurnalis, pakar hukum) kental di dalamnya. Lain hal dengan tradisi Amerika, para pemikir Inggris lebih berkuat pada teori-teori normatif. Isu-isu yang diusung oleh tradisi ini juga lebih variatif seperti isu *low politic* kontemporer seputar kemanusiaan, masyarakat sipil, dan persoalan gender. Perspektif yang digunakan juga

cukup banyak seperti konstruktivisme dan turunan dari perspektif liberalisme lainnya (Karim, 2019, p. 99).

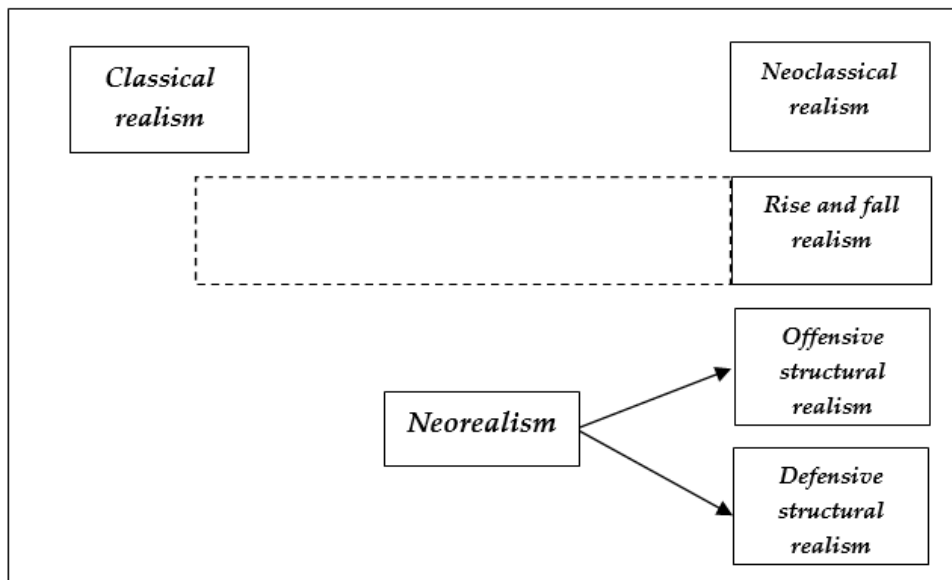
Walaupun aliran pemikiran Amerika dan Inggris mendominasi sekaligus menjadi generator penggerak haluan evolusi hubungan internasional sebagai sains modern, namun demikian masih terindikasi sejumlah tradisi pemikiran alternatif praktis lahir di daratan Eropa yang menawarkan serbaneka kerangka teoretis bersifat relevan dengan diskursus akademis studi ini yang implikasinya lebih memperbanyak khazanah intelektualisme. Setidaknya dalam sejumlah publikasi teks buku pasca Perang Dingin mencantumkan dua varian tradisi Eropa sentris lainnya yang didalamnya meliputi, yaitu mazhab Frankfurt (*Frankfurt School*) atau Teori Kritis (*Critical Theory*) dan tradisi Frankofon (*Francophone*). Keduanya ditinjau secara substantif dalam perspektif filosofi keilmuan berkontradiktif dengan sejumlah aliran pemikiran arus utama hubungan internasional. Misalnya, mazhab Frankfurt dalam perdebatan ilmiah hubungan internasional tergolong dalam kategori *post-positivism* (Jackson & Sorensen, 2013). Maksudnya, pemikiran kritis Jerman ini mulai mencuat dengan membawa misi di bidang akademik untuk mendekonstruksi hegemoni dan melepaskan belenggu positivisme yang mengekang ilmu sosial. Lebih radikal, misi akademik diampu oleh Teori Kritis bersifat humanistik yang genealogi pemikirannya bersumber dari Karl Marx dengan menuturkan bahwasannya hakikatnya manusia selaku subjek menciptakan alur sejarahnya sendiri, hanya saja tidak berdasarkan kondisi yang mereka pilih. Oleh karena itu, tujuan prioritas dari Teori Kritis tidak hanya sekedar pada kritik metodologi semata, namun juga substansinya adalah untuk emansipasi manusia dari pembatasan-pembatasan sosial yang sengaja diproduksi oleh subjek yang mempunyai

otoritas politik dan otoritas keilmuan (Linklater, 1990, pp. 1–2). Hingga dalam perkembangannya karena merujuk pada filsafat Karl Marx, maka kehadiran Teori Kritis dalam hubungan internasional memfasilitasi pertumbuhan sejumlah teori internasional Marxisme meski dalam realitasnya cenderung termarginalkan dari diskusi-diskusi ilmiah. Paralel dengan perihal demikian, tradisi Frankofon juga sebagian besar dipengaruhi oleh kerangka berpikir Marxis dan *post-structuralism*. Pemikir-pemikir filsuf kontemporer Prancis seperti Jean Baudrillard, Michael Foucault, Jacques Derrida banyak memengaruhi studi hubungan internasional. *Post-modernism* adalah salah satu pengaruh intelektual-intelektual Prancis terhadap studi ini (Karim, 2019).

Diversitas tradisi pemikiran menjadi bentuk khazanah dari disiplin hubungan internasional. Karenanya terdapat banyak teori yang dapat digunakan bagi seorang peneliti dalam menerjemahkan sebuah fakta yang mengandung makna simbolik dibalik sebuah fenomena hubungan internasional. Teori yang berbeda akan menyajikan pula fakta yang berbeda. Maka dari itu, selaku peneliti mesti bijak dalam memilih teori-teori yang akan digunakan dalam rangka memberi eksplanasi terhadap fakta-fakta yang menjadi objek penelitiannya (Hadiwinata, 2017, p. 22). Dalam konteks tersebut, pada aktivitas penelitian ini penulis memfiltrasi dan memilih sejumlah teori hubungan internasional secara cermat. Adapun secara paradigmatis garis besar kajian penelitian penulis lebih bersendikan pada payung besar perspektif realisme politik beserta teori dan konsep yang menjadi turunnannya.

2.2.1 Realisme *Rise and Fall* atau Realisme Hegemonik

Gambar 2.1 Enam Program Riset Realis (*Six Realist Research Programmes*)



Sumber: Williams, P.D. (Ed.). (2013). *Security Studies: An Introduction*.

Routledge Taylorand Frabcis Group.

Dalam wacana filsafat ilmu pengetahuan yang berkuat dalam konteks kemajuan sains, sedikitnya terdapat dua teori dikotomis yang mencoba menjelaskan mekanismenya, yaitu Teori Popperian dan Teori Kuhnian. Teori Popperian yang dicetuskan oleh Karl Raimund Popper pada intinya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara rasional dan akumulatif, yaitu melalui proses falsifikasi dan penemuan baru. Keputusan seorang ilmuwan untuk mendukung atau menolak suatu teori didasarkan pada pertimbangan objektif, yaitu apakah teori itu lulus pengujian atau tidak (Bakry, 2017, p. 243). Sementara selaku sejarawan ilmu pengetahuan Thomas Kuhn juga memiliki karya intelektual yang berfokus pada mengelaborasi basis filosofis bagaimana proses dari kemajuan sains dapat terjadi melalui teori revolusi sains (*scientific revolution*). Adapun teori Kuhnian yang diperkenalkan oleh Thomas

Samuel Kuhn menuturkan dalam *The Structure of Scientific Revolutions*, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bergerak secara revolusioner, bukan kumulatif dan evolusioner seperti yang dianut positivisme atau falsifikasi Karl Popper. Secara esensial Thomas Kuhn memformulasikan kembali sejarah sains bukan sebagai perkembangan yang linear melainkan kontinum pergeseran paradigma yang terputus-putus (Agger, 2006, p. 50). Kemajuan sains berawal dari perjuangan kompetitif berbagai teori untuk mendapatkan legitimasi intersubjektif dari komunitas sains. Apakah suatu teori diterima atau ditolak, dominan ditentukan oleh pertimbangan irasional, yaitu konsensus dalam komunitas ilmiahnya. Ketika suatu teori berhasil meraih dukungan publik yang luas dari komunitas ilmiahnya, teori tersebut dapat menjadi dominan dan tampil sebagai paradigma yang mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Paradigma ini kemudian menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan membentuk kerangka kerja bagi pemahaman ilmiah dalam bidang tersebut.

Bagi sains, paradigma berperan sebagai kerangka acuan bagi pelaksanaan riset, pemecahan masalah, dan memfiltrasi topik apa saja yang pantas untuk menjadi diskursus. Paradigma ibarat lensa ilmuwan untuk mempersepsikan semesta. Ketaatan intersubjektif dalam ilmu pengetahuan tidak selalu terjadi tanpa hambatan. Ilmuwan cenderung menemui resistensi terhadap perubahan paradigma, terutama ketika fakta-fakta anomali muncul dan tidak sesuai dengan paradigma yang mereka anut. Sikap untuk mengabaikan fakta-fakta anomali ini dapat mengarah pada periode krisis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Krisis menjadi sinyalemen dari dekadensi sebuah paradigma yang kemudian berkonsekuensi pada munculnya desakan untuk lahirnya

paradigma baru yang sama sekali kontras dengan sebelumnya (Adian & Lubis, 2011, pp. 81–83). Jadi, resistansi dari sebuah paradigma tidak bersifat absolut karena dapat bergeser dinamis dikala klimaks akumulasi fakta-fakta anomali yang membuat keabsahan suatu paradigma menjadi goyah.

Misalnya, pergeseran dari model geosentris ke heliosentris dalam pemahaman tentang tata surya. Sebelum teori heliosentris diusulkan oleh Copernicus pada abad ke-16, banyak orang meyakini bahwa Bumi adalah pusat tata surya dan semua planet dan matahari bergerak mengelilingi Bumi. Konsep ini berakar dalam pandangan filsafat dan agama pada masa itu. Namun, dengan munculnya bukti-bukti baru, terutama yang dikumpulkan melalui observasi ilmiah yang lebih canggih, seperti teleskop, pandangan ini mulai bergeser. Teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, dengan planet-planet beredar mengelilinginya, akhirnya diterima sebagai paradigma baru yang menggantikan pandangan geosentris. Perubahan paradigma ini menunjukkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memaksa pergeseran cara berpikir yang sudah mapan sebelumnya. Pergeseran semacam itu merupakan contoh kuat dari bagaimana fakta-fakta baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dapat memicu perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn pada awalnya mengembangkan ide untuk memberi eksplanasi terhadap pergeseran paradigma dalam kerangka ilmu alam, namun produk pemikirannya ini kemudian diterapkan secara luas pada berbagai bidang, termasuk dalam ilmu sosial seperti hubungan internasional. Meskipun perubahan dalam hubungan internasional tidak lebih dramatis dari ilustrasi di atas, terdapat evolusi yang signifikan dalam disiplin ilmu ini.

Hal ini penting untuk diingat ketika mempertimbangkan bagaimana teori hubungan internasional berperan dalam menjelaskan dunia secara periodik (McGlinchey & Gold, 2017).

Hubungan internasional menjadi bidang keilmuan yang dinamis dan konstan menemukan relevansinya hingga kini. Historisitas dari perkembangan hubungan internasional didalamnya tersimpan penjabaran kronologis bagaimana studi ini berkembang dibangun oleh paradigma dan teori yang memproduksi pluralitas narasi historis dari para ahlinya. Akhirnya publikasi buku teks ilmiah terkini dalam bidang ini didalamnya mengulas keberagaman teori. Keberagaman teoretis ini tidak berbeda dengan pluralitas yang ada dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Semenjak pertenggaran intelektual menyertai perkembangan studi hubungan internasional, disiplin ilmu ini dianggap memiliki ciri-ciri dari berbagai paradigma (Molthof, 2011). Heterogenitas teori dan paradigma ini kemudian dapat dipilih secara opsional sebagai instrumen untuk smemandang realitas dunia. Karena itu akar perkembangan hubungan internasional sebagai ilmu pengetahuan bergerak linear dalam perlintasan filsafat sains Thomas Kuhn yang didalamnya konstan melibatkan keberadaan paradigma (Schmidt, 2013).

Dalam studi hubungan internasional, mayoritas ilmuwannya sepakat bahwa realisme memenuhi kriteria sebagai kandidat utama untuk mendapat kedudukan sebagai paradigma dalam kategori Kuhnian, dan selanjutnya para sarjana kontinu untuk mengelaborasi definisi serta mengoperasionalkan asumsi-asumsi inti (*core assumptions*) dari para digma realis. Seringkali paradigma realisme dilafalkan secara bergantian dengan sebutan tradisi realis atau mazhab pemikiran realis. Akan tetapi, meskipun sebagian besar khalayak mengasumsikan realisme sebagai

paradigma utama, paling aktual sejumlah sarjana mempersoalkan sebuah pandangan bahwa realisme merepresentasikan pemikiran teoretis yang tunggal dan koheren, serta sebagai gantinya berargumentasi bahwa sebenarnya ada pelbagai teori lainnya (Schmidt, 2013). Bahkan beberapa diantaranya menilai realis diambang krisis karena kedudukannya sebagai paradigma terkikis oleh akumulasi anomali yang berlawanan dengan asumsi dasarnya. Konfigurasi krisis tersebut diejawantahkan dalam sejumlah fenomena seperti maraknya interdependensi, skenario strategis *positive sum game*, globalisasi, serta pergeseran sejumlah isu strategis yang muncul di dunia kontemporer lebih bersifat *low politic* (Ness, 2014). Sebab itu kegagalan realis dalam merespons transformasi isu dan fenomena dalam kehidupan modern menciptakan ruang kosong yang kemudian telah dimanfaatkan oleh paradigma alternatif lainnya. Para cendekiawan lainnya telah mencetuskan sejumlah paradigma alternatif yang hampir selalu didefinisikan secara kontras dengan realisme (Schmidt, 2013).

Adanya perbedaan paradigma tidak lantas absolut disimpulkan dapat saling menghakimi kekeliruan satu dengan yang lainnya. Pasalnya sebagaimana dalam Kuhnian berlaku prinsip *incommensurability*, yaitu sebuah prinsip yang termuat dalam filsafat ilmu bahwa paradigma tidak dapat dibandingkan satu sama lainnya karena masing-masing paradigma memiliki distingsi perspektif tatkala meninjau realitas (T. Kuhn, 1970). Paradigma seyogianya lensa ilmuwan untuk mempersepsikan semesta. Ibarat kacamata, paradigma berfungsi sebagai lensa untuk memandang fenomena. Jika kacamata yang digunakan berwarna hitam, maka otomatis realitas yang sedang dipandang akan memproyeksikan warna hitam. Begitu pula ketika menggunakan varian warna lainnya, maka realitas yang dipandang manusia akan adaptif sesuai dengan warna kacamata yang

sedang dipakai. Jadi, pandangan terhadap realitas dipandu oleh pilihan opsional paradigma mana yang digunakan. Ilustrasi sederhana tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme dari paradigma dapat beroperasi memanipulasi pandangan manusia terhadap realitas. Oleh karenanya tindakan membandingkan paradigma merupakan perihal nihil. Melalui prinsip tersebut, maka realisme dapat disimpulkan masih tetap menemukan relevansinya sebagai paradigma tradisional dalam hubungan internasional yang berkisar pada gagasan kedaulatan negara dan konsekuensi logisnya, anarki internasional (Lijphart, 1974, p. 43). Realisme dianggap oleh mayoritas sarjana sebagai tradisi definitif dalam bidang hubungan internasional. Karena pentingnya realisme dalam mendefinisikan dan menjelaskan hubungan internasional, maka seiring bertambahnya waktu banyak karya-karya akademik yang menempatkannya dalam posisi sentral dalam pembahasan teori pada kajian ini (Bakry, 2017, p. 90).

Secara terminologis, istilah realisme dipahami secara berbeda dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks filsafat, realisme adalah teori ontologis yang secara diametral bertentangan dengan idealisme dan nominalisme. Realisme ilmiah adalah filsafat ilmu yang menentang empirisme, instrumentalisme, verifikasiisme, dan positivisme. Dalam sastra dan sinema, realisme merupakan pendekatan yang berlawanan dengan romantisme dan eskapisme. Sementara hubungan internasional memaknai realisme politik yang simpleks diartikan sebagai tradisi analitis yang menitikberatkan pada pentingnya aktor negara dalam menjalankan politik kekuasaan demi kepentingan nasional (Donnelly, 2005, p. 29). Konsep kepentingan nasional dalam realisme sering kali diejawantahkan dalam bentuk pengejaran *power* oleh aktor negara dalam politik

internasional sebagaimana dalam doktrin Hans Morgenthau. Aspirasi manusia untuk dalam rangka pengejaran power bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, bukanlah sebuah penyimpangan sementara dari kebebasan yang alami, melainkan konfigurasi fakta yang esensial dalam eksistensi manusia (Morgenthau & Thompson, 2005).

Konsep esensial lainnya yang dijadikan petunjuk utama untuk dapat membantu memahami lanskap politik internasional adalah konsep anarki. Secara leksikal definisi anarki dalam filsafat politik dengan hubungan internasional diterjemahkan secara berbeda. Hubungan internasional mengadopsi konsep anarki diakitkan dengan kehidupan interaksi antarnegara. Oleh karenanya anarki dalam konteks hubungan internasional bersifat internasional. Anarki internasional dipahami sebagai kondisi tidak adanya pemerintah dunia, kekacauan internasional, struktur tatanan internasional. Tidak adanya pemerintahan dunia merupakan konsekuensi dari tatanan politik internasional anarkis dengan adanya konfigurasi struktur tatanan internasional bersistem Westphalia yang menjunjung tinggi kedaulatan negara sebagai pengganti tatanan tradisional bersifat hierarkis kekristenan pada abad pertengahan. Secara genealogis, referensi pemikiran anarki internasional bermula dari konsepsi Thomas Hobbes mengenai kondisi alamiah (*state of nature*) (Lechner, 2022).

Meski secara klasik pemikiran realisme merujuk pada karya intelektual filsuf politik abad pertengahan, akan tetapi akar realisme sering dijumpai dalam sejumlah tulisan sejarah awal umat manusia, terutama sejarah Perang Peloponnesia karya historikus Thucydides. Thucydides tidak pernah secara langsung menasbihkan dirinya selaku pemikir realis karena penyusunan nomenklatur terhadap teori hubungan

internasional baru berlangsung ketika memasuki abad kedua puluh. Namun, ketika meninjau kembali dari perspektif kontemporer, para teoretikus mendeteksi banyaknya persamaan realitas antara dunia modern dengan klasik dalam konteks kerangka berpikir dan berperilaku manusia. Mereka kemudian memanfaatkan sejumlah karya tulis klasik untuk memperkuat konstruksi gagasan bahwa terdapat sebuah teori yang bersifat tidak lekang oleh waktu dengan mencakup secara tekstual seluruh sejarah manusia. Kemudian teori tersebut dikenal secara masif oleh komunitas internasional dengan istilah realisme (Antunes & Casimao, 2017, p. 15).

Realisme menemukan momentumnya sebagai teori yang dianggap relevan selama berlangsungnya Perang Dunia II dengan menawarkan penjelasan meyakinkan mengenai bagaimana terjadinya tragedi destruktif dalam sejarah manusia dapat terjadi dengan merujuk pada tulisan-tulisan sejumlah filsuf politik klasik (McGlinchey & Gold, 2017). Inilah yang merupakan titik tolak dari eksistensi dari realisme yang muncul secara paradigmatis. Dialektika terjadi manakala realisme klasik menjadi antitesis terhadap idealis utopis yang gagal dalam mencegah terjadinya agresi senjata skala masif melalui mekanisme pembentukan organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dalam memandang peristiwa Perang Dunia, akar masalahnya dalam hemat realisme klasik faktor utama yang menjelaskan perilaku negara adalah sifat dasar manusia. Dengan begitu kondisi konflik, kekacauan, dan kekerasan menjadi bagian dari definisi anarki dalam konteks realisme klasik yang diproduksi oleh antropomorfisme negara yang dipersonifikasikan selaku manusia yang memiliki sifat egosentrik dan kehendak untuk berkuasa (*animus dominandi*) dalam politik internasional (Morgenthau & Thompson, 2005).

Kalangan akademis lebih lanjut mengembangkannya dengan memodifikasi masing-masing asumsi dalam paradigma tradisional ini ketika mencoba untuk membentuk kembali realisme menjadi paradigma yang berguna untuk memahami dunia pada masa kini (Ness, 2014). Revolusi Behaviorialisme menjadi peristiwa monumental dalam perkembangan ilmu hubungan internasional yang didalamnya memuat agenda dialektika pertenggaran intelektual para saintis pasca konfrontasi idealisme-realisme yang subtansinya berkuat pada permasalahan aspek metodologis keilmuan yang digugat oleh golongan saintifik yang menghendaki perubahan dengan menawarkan pendekatan ilmiah. Dalam hemat mereka, historisitas hubungan internasional sebagai sains bersifat impresionistik karena dibangun oleh sublimasi pengalaman-pengalaman aktornya menyebabkan stagnasi melingkupi disiplin ini dibandingkan dengan bidang ilmu sosial lainnya yang lebih berkembang progresif secara terstruktur oleh adanya segenap penelitian-penelitian ilmiah dengan panduan metodologi yang jelas (Burchill & Linklater, 2005, p. 1). Sehingga metode historis interpretatif dalam kasus tertentu, subjektivitas dapat menginfiltrasi ke dalam teori yang diciptakan oleh kelompok tradisionalis. Dalam pemaham lain, teori yang tercetus tidak bersifat saintifik karena menihilkan objektivitas. Oleh karenanya, banyak karya klasik yang dipublikasikan kelompok tradisionalis dalam menggambarkan dunia pada praktiknya tidaklah memenuhi kualifikasi ilmiah karena tidak mengikuti panduan konstruktif melalui prosedur uji hipotesis, validasi teori, pembuktian hubungan antar variabel penelitian, penentuan parameter, sehingga karya mereka hanya dianggap sebatas paparan sekuensi sejarah (M. A. Kaplan, 1966, p. 2). Hanya dengan metode itu pengetahuan dalam hubungan internasional dapat dibangun secara progresif , sehingga memungkinkan adanya intuisi yang lebih

besar dan kemajuandalam pengembangan teori (M. A. Kaplan, 1966, p. 380).

Revolusi Behaviorialisme dalam ilmu sosial, termasuk dalam studi hubungan internasional, memiliki dampak signifikan terhadap perspektif realisme. Dengan adanya Behavioralisme, realisme dalam hubungan internasional mengalami evolusi menuju teori yang lebih saintifik. Ini memungkinkan studi hubungan internasional untuk lebih memenuhi standar ilmiah yang lebih ketat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan validitas dan keandalan penelitian dalam bidang (Hadiwinata, 2017, p. 110). Realisme secara evolusioner memiliki kualitas yang lebih saintifik dibandingkan rujukan tradisional di masa lampau dengan landasan filsafat, sejarah, dan sifat dasar manusia. Realisme semakin menjauh dari refleksi umum yang dikritik Morton Kaplan dan menuju visi teori seperti yang didukung kelompok saintifik, sehingga transformasi terjadi dengan label realisme saintifik, realisme struktural, atau neorealisme (Benneyworth, 2011). Alhasil, selaku paradigma tradisional melalui peristiwa Revolusi Behavioralisme secara evolusioner realisme menjadi embrio bagi kelahiran kerangka teoretis serupa lainnya. Dengan kata lain, paradigma merupakan himpunan dari aneka varian teori. Dalam hubungan internasional, paradigma realisme menjadi tempat bernaung bagi turunan teori lainnya. Para pemikir realis etidaknya dalam perkembangan yang paling aktual memberi atensi lebih terhadap fragmentasi sistematis di lingkungan internal akademik kalangan ini. Rasa tidak puas yang semakin menggelora terhadap aliran neorealisme menyebabkan bangkitnya kembali minat terhadap aliran tradisional realisme, friksi baru antara pemikir realisme ofensif dan realisme defensif,

serta telah meningkatkan hasrat untuk merekonstruksi realisme dengan landasan teoretis dan empiris yang lebih kuat.

Terlepas dari heterogenitas teoretis tersebut, semuanya memiliki inti asumsi yang serupa seperti: negara menjadi unit utama dalam politik dunia yang bertindak atas dasar rasionalitas dalam rangka meningkatkan keamanan, *power*, dan kemakmuran dalam sistem internasional yang penuh konflik. Sejumlah teori realisme juga menghasilkan proposisi umum bahwa distribusi *power* dalam sistem merupakan variabel utama yang menentukan hasil-hasil internasional; bahwa konsentrasi *power* yang tinggi dalam sistem internasional umumnya diarahkan pada pemblokadean aliansi yang implikasinya menimbulkan konflik terbuka dan sebagai antisipasinya umumnya beroperasi untuk mempertahankan sistem kedaulatan negara dan mencegah terbentuknya dan dipertahankannya hegemoni. Dengan demikian, realisme klasik, neorealisme Waltzian, realisme ofensif dan defensif, dan realisme neoklasik semuanya merupakan teori *balance of power*, meskipun spesifikasinya berbeda-beda mengenai siapa aktor sesungguhnya yang menyeimbangkan, dalam kondisi seperti apa, dan dampaknya praktisnya seperti apa (DiCicco & Levy, 2003, p. 110).

Terdapat aliran pemikiran lainnya yang menganut asumsi dasar realis mengenai penentuan peran *power* dalam konstelasi politik dunia, tetapi menolak asumsi teori *balance of power*. Diantaranya terindikasi sejumlah pemikir terkemuka seperti Organski (teori *power transition*), Robert Gilpin (teori stabilitas hegemoni), Modelski dan Thompson (teori *long cycle*). Masing-masing pendekatan ini secara substantif berhipotesis bahwa hegemoni dalam sistem internasional lazim terbentuk karena mekanismenya dapat bersifat menstabilkan tatanan internasional yang

berdampak langsung pada terciptakan kondisi perdamaian internasional. Varian teori disebut sebagai realisme *rise and fall* atau realisme hegemonik (DiCicco & Levy, 2003, p. 111). Oleh sebab itu, setidaknya hingga penelitian ini dilakukan terdeteksi enam jenis program riset realisme, yaitu meliputi realisme klasik, neorealisme, dan ditambah empat macam realisme kontemporer: realisme *rise and fall*, realisme neoklasik, realisme struktural ofensif, dan realisme struktural defensif (Elman & Jensen, 2013, p. 16).

Sebagaimana paragraf sebelumnya meski pada teori-teori tersebut terindikasi bersilang paham dalam konteks asumsi dasarnya, tetapi semuanya masih terhimpun menjadi satu kesatuan dalam payung besar paradigma realisme. Maksudnya, sebuah teori diperbolehkan berbeda dengan teori lain yang masih dalam satu lingkup paradigma, tetapi tidak boleh berlawanan dengan paradigmanya. Sebagaimana misalnya teori realisme neoklasik boleh berbeda pendapat dengan teori neorealisme namun keduanya tetap kompak di bawah naungan paradigma realisme (Rosyidin, 2020, p. 13).

Imre Lakatos mengembangkan konsep program riset untuk memahami variasi paradigma dan teori dalam ilmu, termasuk dalam hubungan internasional. Menurut Lakatos, setiap paradigma memiliki asumsi dasar yang disebut sebagai *hard core*, yang menjadi demarkasi antara paradigma satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, paradigma realis memiliki asumsi dasar bahwa negara adalah aktor utama yang bertindak untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam suasana konflik kepentingan. Menurut Lakatos, asumsi dasar ini harus dipegang teguh oleh penganut paradigma tersebut, karena mengubah asumsi dasar berarti mengubah seluruh teori atau paradigma. Namun, Lakatos juga mengakui

bahwa suatu teori atau paradigma dapat dimodifikasi sesuai dengan fakta yang ada. Modifikasi ini diperbolehkan untuk proposisi-proposisi tertentu yang dinamakan *auxiliary hypothesis*. Proposisi-proposisi ini bisa diubah tanpa mengganggu asumsi dasar paradigma, sehingga memungkinkan perkembangan dan penyesuaian teori dengan fakta-fakta baru tanpa harus mengubah asumsi dasarnya (Rosyidin, 2020, p. 14).

Realisme *rise and fall* menjadi bagian dari program riset kontemporer yang secara teoretis tetap bersandikan pada muatan asumsi dasar paradigma realis. Kondisi lazim dalam paradigma ini diisi oleh perbedaan diantara teori-teorinya. Realisme *rise and fall* muncul sebagai alternatif yang kuat terhadap teori realisme struktural defensif (*balance of power*) yang mendominasi keilmuan hubungan internasional pada tahun 1950-an. Berselisih paham dengan *balance of power*, teori ini meyakini bahwa sistem unipolaritas merupakan pilihan yang bijak untuk menghasilkan stabilitas internasional lewat mekanisme sentralisasi kekuasaan dengan menempatkan hanya pada satu negara kuat di puncak hierarki untuk aktif menjaga tatanan internasional. Secara empiris teori ini mengkaji dalam skala makro dinamika dalam perpolitikan dunia dengan objeknya menaruh atensi utama terhadap fenomena siklus kebangkitan atau peningkatan dan dekadensi negara-negara besar dalam sistem internasional yang berpotensi besar melahirkan konflik internasional yang destruktif.

Secara khusus, kajian dari teori realisme *rise and fall* menekankan bahwa mencegah atau meminimalisir probabilitas terjadinya konflik atau perang antarnegara-negara besar manakala sistem internasional hanya didominasi oleh satu negara sebagai kekuatan utama, dan diikuti oleh absensi kompetitor yang berhasrat untuk mendapatkan status

kepemimpinan dalam sistem tersebut. Mengingat kedudukan istimewanya, negara dominan mampu membentuk aturan dan praktik sistem internasional sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan egoisnya. Stabilitas adalah produk dari tatanan hegemonik ini. Namun, ketika *power* menjadi lebih seimbang (*parity*) akibat pola pertumbuhan yang berbeda, konflik perebutan kepemimpinan sistem menjadi niscaya (Elman & Jensen, 2013, p. 24).

Logika unipolar dapat beroperasi sebagai stabilisator pada pasca periode Perang Dingin dikarenakan adanya satu kekuatan utama yang menjadi organisator untuk menihilkan rivalitas dan tatanan dengan satu kekuatan utama akan meniadakan upaya untuk menciptakan perimbangan kekuatan. Dalam perspektif realisme *rise and fall*, kekuatan utama akan senantiasa berusaha untuk memangkas munculnya ancaman dari kekuatan-kekuatan kedua yang berpotensi menandingi kekuatan utama. Dengan demikian, konflik atau perang yang terjadi bersifat preventif untuk mencegah kekuatan revisionis, yang pada akhirnya perang global yang dapat mendekonstruksi tatanan *status quo* (Wardoyo, 2015).

Realisme *rise and fall* menggambarkan sebagian besar sejarah manusia yang mendokumentasikan fenomena kebangkitan dan kejatuhan kekuatan-kekuatan besar (*great powers*) secara berkesinambungan. Untuk memberikan eksplanasi terhadap tren historis tersebut, kajian realisme *rise and fall* memberikan atensi khusus terhadap mekanisme penyebab dinamika negara-negara dalam sistem internasional yang tumbuh pada tingkat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Berbeda pandangan dengan realisme struktural atau neorealisme yang meninjau perubahan dalam distribusi kemampuan dalam sistem internasional

sebagai hasil dari aliansi dan perang, kelompok realis *rise and fall* berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan yang berbeda terutama disebabkan oleh proses yang bersifat internal di dalam negara (Elman & Jensen, 2013, p. 25). Dalam konteks tersebut, sejumlah pemikir dari kelompok ini menguraikan tahapan-tahapan progresif dalam tingkatan domestik dilakukan oleh suatu negara yang dapat menjadi variabel peningkatan atau kebangkitan kedudukannya di level internasional sehingga pada akhirnya sanggup memengaruhi sistem internasional.

Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, teori realis *rise and fall* dapat membantu untuk memahami dan menjelaskan kebangkitan negara Tiongkok yang menyanggah status internasional sebagai kekuatan besar sedang meningkat yang betatap langsung (*vis-à-vis*) dengan dekadensi kekuatan global Amerika Serikat. Realisme realis *rise and fall* berpandangan pesimistis terhadap realitas internasional kebangkitan Tiongkok dan konsekuensinya terhadap kontinuitas perdamaian dalam politik internasional. Tatkala kekuatan Tiongkok konsisten menjaga laju ritme peningkatan kapabilitas dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka hubungan antara kedua negara akan menjadi semakin antagonis, hingga mencapai klimaks ketegangan ketika penantang memangkaskan jarak disparitas dalam konteks kekuatan material. Bilamana disitribusi kekuatan dari penantang konstan terjadi, maka dampak strategisnya Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan secara sukarela menyerahkan kedudukannya di puncak sistem internasional dengan mengaktualisasikan metode preventif terhadap kebangkitan Tiongkok dalam rangka mempertahankan status hegemoninya dalam sistem internasional (Elman & Jensen, 2014, p. 18).

Demikian pula ketika kekuatan Tiongkok meningkat, akan menimbulkan konsekuensi logis terhadap tuntutan terhadap upaya memperbesar pengaruhnya dalam pusran perpolitikan internasional dan mengkalkulasikan kembali utilitas dan keuntungan yang diraih agar mendapat porsi yang lebih besar. Jika ekspektasi ini tidak dapat terpenuhi, maka Tiongkok berpotensi besar akan memainkan peran antagonis selaku kekuatan revisionis yang mencoba mendekonstruksi kedudukan Amerika Serikat dalam hierarki sistem internasional. Perihal demikian dapat terealisasikan karena oleh estimasi Tiongkok terhadap kekuatan *status quo* secara negatif dengan mempersepsikan kontinum kebijakan luar negeri Amerika Serikat bersifat intimidatif dan represif yang implikasinya signifikan membatasi kapasitas untuk mencapai manfaat sejalan dengan pertumbuhan kekuatan negara Tiongkok (Elman & Jensen, 2014, p. 19).

Pada penelitian saintifik ini penulis lebih spesifik menggunakan teori *power transition* dan aneka konsep evolusioner lainnya yang linear perkembangannya dengan teori tersebut. Sebagai teori yang tumbuh dalam tradisi Amerika, maka teori *power transition* dengan kapasitasnya dapat menjadi instrumen penulis untuk memberikan sebuah penjelasan logis berkaitan dengan fenomena kebangkitan Tiongkok dan dekadensi Amerika Serikat di dunia modern selaku peristiwa siklis dalam konteks sejarah politik internasional. Diawali oleh memahami dan serangkaian aneka proyek inisiatif strategis dalam tingkatan domestik negara Tiongkok sebagai konfigurasi dari akumulasi rasa tidak puas terhadap tatanan internasional yang implikasinya positif bagi kebangkitan dan peningkatan status di level internasional, khususnya dalam tingkatan regional Indo-Pasifik yang memangkas level disparitas *power* dengan

kekuatan utama regional semakin menipis. Konsekuensi praktis oleh adanya perihal tersebut, alhasil konflik terbuka dengan kekuatan utama regional, yaitu yang diampu oleh negara Amerika Serikat menjadi niscaya terjadi.

2.2.2 Teori Power Transition (*Power Transition Theory*) A.F.K Organski

Genealogi dalam artian simpleks dipahami sebagai kajian untuk menapaki asal-usul. Artinya genealogi menjadi metode berpikir refleksi historis untuk mendeteksi jejak pertalian mengenai kemunculan ihwal tertentu. Dengan metode tersebut, penulis berupaya menganalisa awal mula kemunculan teori *power transition* dalam hubungan internasional dan mendeteksi kerangka pemikiran dan paradigma hubungan internasional yang mengkontaminasi teori tersebut. Teori *power transition* merupakan hasil dari produk intelektual A.F.K Organski dalam kajian studi studi politik dunia yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1958 dalam karya tulisnya berjudul *World Politics*. Reputasi Organski dikenal sebagai figur ilmuwan, praktisi, dan pengajar terkemuka studi politik dunia yang lahir di kota Roma, Italia. Kemudian Organski berpindah ke Amerika Serikat untuk membebaskan diri dari belenggu undang-undang anti-Yahudi di rezim otoritarianisme Benito Mussolini. Disanalah Organski meniti karir sebagai prajurit militer yang bertugas dalam Perang Pasifik. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Organski mulai merintis karir akademik selaku dosen di sejumlah universitas Amerika Serikat (Tammen et al., 2000). Oleh sebab itu, riwayat akademik memengaruhi konstruksi berpikir Organski mengenai politik global yang telah terkonsepkan oleh tradisi saintifikasi dari pemikiran ilmu sosial Amerika Serikat yang secara paradigmatis didominasi oleh pemikiran-pemikiran realisme ilmiah. Dengan begitu sangat logis bila Organski

mengkritik inkonsistensi aliran pemikiran realisme Hans Morgenthau. Dalam konteks metodologis, Organski menggunakan bukti empiris untuk menguji proposisi disaat pemikir lainnya tendensius menggandalkan naluri dan otoritas (Tammen et al., 2000).

Pada konteks perkembangan teoritis teori *power transition*, dalam sejumlah untaian tulisan para sarjana melakukan penelusuran teoretis untuk mencari validitas genealogi dan mengklasifikasikan pokok pemikiran teori tersebut sesuai dengan paradigma hubungan internasional. Berapa diantaranya mengemukakan argumentasi analitis bahwa teori *power transition* secara esensial dalam tingkatan paradigmatis paralel bersamaan dengan realisme politik, lebih spesifik dijadikan sebagai pendekatan *hegemonic realist* dalam hubungan internasional (Wyatt, 2022). Sejumlah alasan melingkupi dibalik koherensi *power transition* dengan kerangka berpikir realis seperti karena dijadikan kerangka analisa untuk memahami sejumlah aspek sentral dalam hubungan internasional menyangkut dinamika distribusi *power* dalam politik internasional yang koheren dengan peristiwa konfrontasi kekuatan sehingga dapat memengaruhi tatanan sistem internasional (Lai, 2011, p. 5). Teori *power transition* linear dengan paradigma realis karena dapat memberi eksplanasi logis mengenai gejala kemunculan konflik internasional diantara negara-negara kuat (Züfle, 2011). Selain itu, teori *power transition* dan realisme mempunyai perspektif identik dalam persoalan peran *power*, karena memandangnya sebagai variabel penting yang membentuk fungsi tatanan internasional dan memandang kekuatan relatif sebagai prasyarat penting untuk menentukan perdamaian atau perang dalam sistem internasional (Unoki, 2016, p. 17). Secara jelas teori politik dunia ini bersifat probabilistik yang mengajukan hipotesis

probabilitas konflik global dalam situasi paritas kekuatan material negara-negara besar yang mana setidaknya salah satu subjek negara diantaranya dalam kondisi merasa tidak puas (Tammen, 2008, p. 318). Pada konteks itu, teori *power transition* menjadi objek kajian dalam program riset realisme *rise and fall* (Elman & Jensen, 2013). Meskipun koheren dengan realis, tetapi teori *power transition* berbeda secara substansial dengan mazhab tersebut dalam konten konseptual tertentu (Tammen et al., 2017, p. 1).

2.2.2.1 Analisis Metode Lakatosian Teori Power Transition

Dalam sub-bab pembahasan ini, penulis akan mengkaji kembali tulisan teoretis yang bertajuk *The Power Transition Research Program: A Lakatosian Analysis* yang dikarang oleh Jonathan M. DiCicco dan Jack S. Levy dengan alasan dapat menopang riset yang sedang dilakukan karena memberikan basis pemahaman teoretis yang lebih komprehensif. Dalam pandangan filosofis keilmuan, tulisan tersebut hakikatnya menguatkan kedudukan teori Organski karena mengulik lebih dalam dipandu oleh metodologi yang lebih canggih melalui program riset Imre Lakatos. Mengingat Organski sendiri menggarisbawahi teori *power transition* secara sistematis seiring dengan bertambahnya waktu dan mengakui karya tulisnya *World Politics* (teori *power transition*) terdapat sejumlah celah yang secara persuasif agar dapat disempurnakan dengan mengeksplorasi lebih holistik (Organski, 1968). Atas dasar kesadaran tersebut, maka cukup untuk menjadi alasan program riset Imre Lakatos secara metodologis dapat membantu secara konstruktif dalam konteks kegiatan teoretisi.

Konsep sentral dari metodologi program riset saintifik Imre Lakatos terletak pada konsep komponen inti atau inti pokok (*hard core*), yaitu yang leksikal dipahami sebagai seperangkat asumsi fundamental yang menjadi

ciri khas dan determinan pokok dari program riset saintifik yang tidak dapat diganggu gugat oleh peneliti dengan mekanisme modifikasi inti pokok dan diharuskan untuk melindunginya dari ancaman falsifikasi. Heuristik negatif ini dapat memandu program riset sesuai koridor. Maknanya, bilamana peneliti terindikasi melanggar aturan metodologis dengan menyentuh inti asumsi dasar untuk dimodifikasi, maka hakikatnya telah menarik diri dari program penelitian yang sedang dilaksanakan. Peneliti menggunakan asumsi-asumsi ini untuk membangun sistem teoretis, memperoleh hipotesis-hipotesis tambahan atau bantuan (*auxiliary hypothese*) yang ada pada lingkaran sabuk pelindung (*protective belt*) di dalam wilayah inti program riset, dan menguji riset tersebut secara empiris. Hipotesis tambahan yang ada pada sabuk pelindung akan mengemban beban pengujian. Secara simpleks, dalam program penelitian diperkenankan untuk modifikasi hanya menyasar pada hipotesis tambahan yang memungkinkan suatu program riset berkembang tanpa mendekonstruksi komponen asumsi dasar. Kontribusi besar dari *metatheory* Lakatosian adalah memberikan kriteria untuk menilai apakah penambahan hipotesis bantuan bersifat progresif dan meningkatkan pengetahuan ilmiah atau malah bersifat regresif (DiCicco & Levy, 2003).

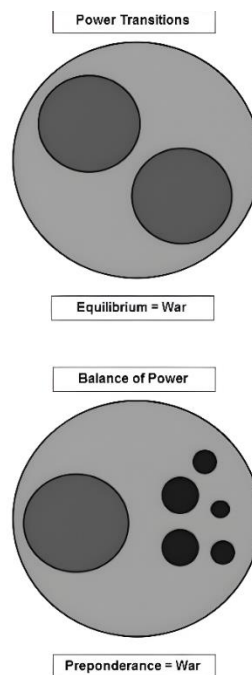
Meskipun ungkapan otentik Organski tentang teori *power transition* dalam tulisan teoretisnya tidak eksplisit memuat susunan asumsi secara konstruktif, secara konkret Organski melakukan tindakan akademis dengan modal keberanian intelektualnya untuk mengkritik kaidah politik internasional yang dinilai tidak dapat diubah, yaitu *balance of power* (Organski, 1968). Teori *balance of power* mendapat momentum popularitasnya pasca Perang Dunia II sehingga praktis teori ini tidak

hanya diadopsi oleh kalangan akademis pada masa itu, tetapi juga digunakan oleh praktisi politik terkemuka yang memiliki kedudukan tinggi dan pengaruh masif (Tammen et al., 2000). Melalui metode Lakatosian, dalam perkembangan mutakhir teoritis *power transition* mengkaji kembali dengan metode Lakatosian membuahakan sejumlah asumsi dasar (*hard core*). Penetapan terhadap asumsi dasar berguna untuk mengidentifikasi distingsi antar teori. Adapun seperangkat asumsi dasar yang membentuk teori *power transition* meliputi: (1) negara adalah aktor utama dalam politik internasional; (2) para aktor negara mengutamakan rasionalitas dalam memfiltrasi preferensi politik luar negerinya; (3) tatanan internasional dikelola secara hierarkis dibawah kepemimpinan suatu kekuatan dominan; (4) pertumbuhan dan perkembangan secara internal negara menjadi varibael eksplanatori yang memengaruhi dinamika internasional; (5) kohesi aliansi antarnegara relatif tidak fleksibel dan akibatnya aliansi bukan sarana untuk meningkatkan kekuatan nasional (DiCicco & Levy, 2014).

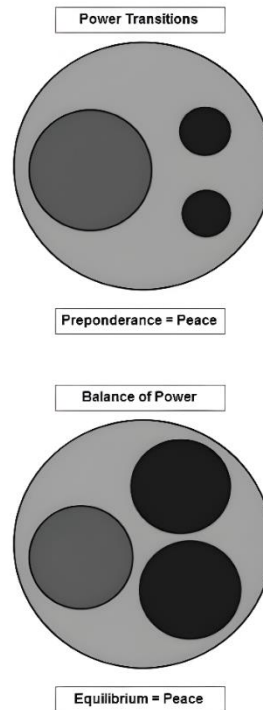
Melalui pengamatan terhadap asumsi dasarnya, Organski membalikan logika *balance of power* untuk memahami realitas politik internasional. Agar dapat membedakan pandangan terhadap realitas politik internasional, maka penting untuk melakukan komparasi asumsi dasar teori *power transition* dengan teori realis *balance of power*. Meski keduanya memiliki asumsi harmoni dalam konteks negara sebagai aktor kunci dalam sistem internasional dan penekanan pada aspek rasionalitas, hanya saja terdapat perbedaan fundamental yang menjauhkan keduanya secara teoretis. Bilamana *balance of power* menyertakan komponen perkembangan internal dan aliansi kekuatan sebagai sumber dinamika internasional, teori *power transition* menafikan aliansi negara dan lebih

mengutamakan pertumbuhan internal negara sebagai variabel yang memengaruhi sistem internasional secara dinamis. Organski menyatakan bahwa sejak terbentuknya sistem Westphalia dan revolusi industri pertama kali digambarkan, ketika itu pula nasionalisme dan industrialisasi menjadi motor pergerakan kebangkitan suatu negara yang hasilnya secara siklis dapat dipastikan politik internasional berubah dinamis. Pertumbuhan internal ini telah mengikis praktik aliansi sebagai mekanisme utama untuk mengkonfigurasi ulang hubungan politik internasional. Diferensiasi kedua teori tampak dalam asumsi dasar dalam mekanisme sistem internasional. Asumsi dasar realisme struktural anarki menjadi prinsip utama dalam hubungan internasional. Tatahan internasional terkelola dengan baik dalam bentuk struktur hierarki yang ditentukan oleh distribusi *power* dan seperangkat aturan yang ditentukan oleh kekuatan pemuncak hierarki global (DiCicco & Levy, 2003, pp. 120–123).

Gambar 2.2 Komparasi Dua Pola Teoretis Terjadinya Perang atau Konflik Internasional



Gambar 2.3 Komparasi Dua Pola Teoretis Terjadinya Perdamaian atau Stabilitas Internasional



Sumber : Tammen, R. L. (2008). The Organski Legacy: A Fifty-Year Research Program. *International Interactions*, 34(4), 314-332.

Secara substantif, kondisi ekuilibrium internasional dalam amatan analitis Organski dapat mereduksi stabilitas internasional sebagai sinyalemen buruk karena bagian dari salah satu dari dua indikator yang memicu probabilitas eskalasi konflik. Sementara disparitas *power* justru koheren dengan metode taktis untuk menjaga stabilitas global. Pemutarbalikan logika politik internasional Organski wujud dari inkompatibilitas konsep anarki dan hierarki. Berlawanan dengan agumentasi konvensional yang menuturkan bahwa negara-bangsa menyimpan orientasi strategis pada memaksimalkan *power* atau keamanan masing-masing (realisme ofensif dan defensif) dengan mengorbankan entitas lainnya, Organski memandu untuk berpikir

mengenai bentuk dunia sebagai entitas yang konstruktif teratur dan terstruktur. Negara-negara memang memaksimalkan *power* dalam kondisi tertentu, namun perihal ini tidak konstan memenuhi tujuan negara besar untuk melakukan hal tersebut dengan mengorbankan negara lain. Untuk negara yang mempunyai surplus *power* untuk dijadikan instrumen mengelola sistem internasional dengan mekanisme yang kooperatif adalah jauh lebih baik. Hal ini mencakup *power-sharing* dalam aliansi keamanan dan asosiasi ekonomi. Mekanisme *power-sharing* ini mendistribusikan tanggung jawab dan konsensus negara-negara terhadap seperangkat norma internasional yang berlaku di mana negara dominan (pemuncak hierarki internasional) dengan kapasitasnya yang mampu memengaruhi aneka peristiwa yang terjadi. Ini adalah konfigurasi sosialisasi politik dunia melalui internalisasi nilai-nilai yang dianut secara general. Dalam hal ini, teori *power transition* secara situasional (stabilitas internasional) beririsan dengan perspektif arus utama teori lainnya (Tammen, 2008, pp. 317–318).

Dalam program riset Lakatos, terdapat aturan-aturan metodologis yang dikenal dengan istilah heuristik yang terbagi dalam dua jenis. Heuristik negatif Lakatos menggambarkan jenis dan model yang harus dihindari oleh peneliti dalam program penelitian karena menyimpang dari asumsi inti. Dengan demikian, jika terindikasi antusiasme dalam agenda teoretisi politik internasional Organski, pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti adalah tidak diperkenankan untuk memodifikasi sejumlah asumsi dasar yang disebutkan di atas. Kemudian Lakatos berpendapat bahwa riset yang terprogram selanjutnya dipandu oleh heuristik positif, yaitu seperangkat usulan atau petunjuk yang diartikulasikan secara parsial bersangkutan dengan mekanisme

bagaimana mengembangkan atau memodifikasi sabuk pelindung dari program riset penelitian. Adapun karakterisasi heuristik positif *power transition* diantaranya adalah : (1) membangun model yang menjelaskan permulaan perang besar selama periode industrialisasi menggunakan interaksi *power transition* dan tingkat kepuasan terhadap *status quo*; (2) membangun indikator kuantitatif kekuatan nasional yang merefleksikan sumber dinamika antarnegara; (3) mengembangkan definisi konseptual dan operasional kapasitas politik; (4) mengembangkan definisi konseptual dan operasional tentang tingkat kepuasan terhadap *status quo*; (5) jika kombinasi kekuatan relatif dan tingkat kepuasan terhadap *status quo* gagal memberi ekplanasi *power transition*, maka kaitkan faktor-faktor mitigasi seperti potensi pihak yang menantang, akselerasi proses *power transition*, faktor fleksibilitas kekuatan dominan, dan relasi persahabatan antara kekuatan dominan dan penantang (DiCicco & Levy, 2003, p. 128).

Sejauh ini, program riset teori *power transition* berkembang sesuai koridor dengan mempertahankan kontinuitas asumsi dasar dan hanya mereformulasi komponen hipotesis tambahan yang menyertai inti pokok secara dinamis berkembang dan berubah. Secara garis besar, konkretisasi progresivitas dari program riset teori *power transition* melahirkan beberapa kerangka konseptual baru oleh sejumlah pemikir (DiCicco & Levy, 2003, p. 132). Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kerangka teoretis agar mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dari kajian penelitian ini, penulis menguraikan sejumlah konsep-konsep penting dan mengaplikasikan aliran pemikiran teori *power transition* seperti Douglas Lemke yang menjadi inisator dari operasionalisasi hierarki internasional ke dalam lingkungan strategis regional yang dikenal dengan konsep hierarki *multiple*.

2.2.2.2 Hierarki Internasional Teori *Power Transition*

Apabila sejumlah aliran memandang anarki sebagai kondisi alamiah dari sistem internasional, maka realisme *rise and fall* menegaskan asumsi

Gambar 2.4 Pendekatan Hierarki terhadap Politik Internasional

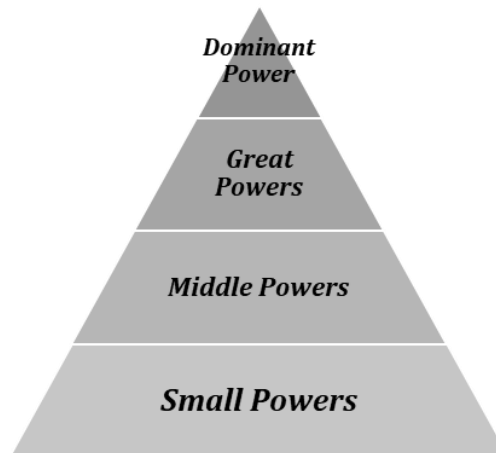
tersebut. Tiga pendekatan teoretis utama yang menggarisbawahi hierarki dalam pemahaman hubungan intrnasional empiris adalah teori *power transition*, teori stabilitas hegemonik (*hegemonic stability theory*), dan teori siklus panjang (*long cycle theory*). Seperti pendekatan hubungan internasional tradisional, masing-masing pendekatan telah memberi landasan bagi turunan dan pendekatan teoretis baru yang berupaya memperluas kemampuan eksplanasinya (Rhamey & Kugler, 2020, p. 9). Teori *power transition* mengajukan proposisi bahwa struktur hierarki adalah fenomena alamiah yang berlaku baik dalam arena domestik maupun hubungan internasional internasional. Struktur hierarki merupakan salah satu konsep kunci dalam memahami imaji Organski terhadap politik internasional. Hierarki adalah pengorganisasian aktor-aktor yang berhubungan satu sama lain berdasarkan sejumlah kriteria. Selaku prinsip yang mengatur, hierarki menjelaskan hubungan kausalitas dari peristiwa yang diobservasi dalam politik internasional. Dalam konteks teori *power transition*, hierarki internasional terhubung langsung dengan konsep *power* negara atau kemampuan untuk memerangui pihak lainnya. Kemampuan ini dapat berakar dari pada sumber daya material (Rhamey & Kugler, 2020, pp. 1–2). Di dalam sistem Westphalia, selalu ada distribusi *power* yang tidak merata tergantung dengan perkembangan domestik (Lai, 2011). Oleh karenanya semua negara dalam tatanan internasional mengakui adanya hierarki dan distribusi *power* tersentralisasi dalam beberapa entitas kekuatan (Unoki, 2016, p. 18).

Stage of Hierarchy	Theory	Summary	Theoretical Offshoots	Similar Approaches
Parity	Power Transition (Organski and Kugler)	A dominant state and a dissatisfied rising challenger are more likely to engage in conflict with one another as their capabilities become more equal.	Multiple Hierarchy Theory (Lemke) Dominance Vacuum Theory (Rhamey et al.) Parity and Civil War (Cederman) Phoenix Factor (Kugler) Alliance Transitions (Kim)	Leader Time Horizons (David Edelstein) Shatterbelts (Kelly) Power Preference Disparity (Powell) Power Cycle Theory (Doran)
Dominance	Hegemonic Stability (Kindleberger)	Dominant states provide stability to the international system through economic- or security-related public goods, as well as support for normative rules of conduct for others to follow. These public goods benefit most other actors and are provided at a cost to the dominant state so that they might preserve the status quo and thereby their position of dominance.	Hegemonic War (Gilpin) Hegemonic Trade (Krasner) Liberal Leadership (Ikenberry) Financial Order (Drezner and McNamara)	Status Attribution (Volgy) Authority (Lake) Unipolarity (Wohlforth)
Evolution	Long Cycle (Modelski and Thompson)	In their rise and fall, great powers at the core of the international system develop economic and technological innovations that provide order and stability to the international system as they socialize actors. As they decline, the system devolves into conflict as great powers become overextended. War, then, serves as the agent for change for rules and norms by which the international system operates.	Arc of War Theory (Levy and Thompson) Global Leadership (Rasler and Thompson) Comparative World Systems (Chase-Dunn and Hall)	Role Alignment Theory (Lahneman; Thies) World Systems Theory (Wallerstein)

Sumber : Rhamey Jr, J. P., & Kugler, T. (2020). *Power, Space, and Time: An Empirical Introduction to International Relations*. Rowman & Littlefield Publishers.

Logika hierarki Organski dalam teori *power transition* berupaya mengidentifikasi potret peta kekuatan politik internasional dengan mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan kapabilitas kekuatannya dengan entitas terkuat menempati puncak hierarki dalam sistem internasional dan yang lemah menempati posisi paling dasar. Adanya disparitas kapabilitas kekuatan antarnegara dalam sistem internasional menjadi prasyarat terciptanya stabilitas. Kondisi kedamaian hanya dapat dicapai dan dijamin oleh adanya struktur hierarki dalam sistem internasional yang dipayungi oleh satu negara dominan berperan sebagai pengatur hukum dan tata tertib internasional (Organski, 1968). Simpulan tersebut berkontradiktif dengan realisme saintifik yang mengembangkan konsep *balance of power* dengan asumsi dasar kondisi perdamaian antarnegara dapat diraih dengan metode paritas *power*.

Gambar 2.5 Piramida *Power* Sistem Internasional



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Struktur hierarki sistem internasional dalam teori *power transition* Organski dibagi dalam empat klasifikasi yang divisualkan dalam bentuk piramida didalamnya mencakup: *dominant powers*, *great powers*, *middle powers*, dan *small powers* (Organski, 1968, pp. 364–365). Konfigurasi piramida *power transition* Organski mengilustrasikan pemahaman implisit menyangkut relasi kekuasaan dalam sistem internasional. Secara praktis pola piramida ini beroperasi secara elastis yang dipahami keanggotaan dalam setiap pengelompokan hierarki dinamis silih berganti namun tidak menghapus garis demarkasi internal struktur piramida. Oleh sebab itu piramida ini menjadi instrumen untuk memahami dinamika politik internasional. Dalam pola piramida tersebut memberi tempat kepada kekuatan dominan (*dominant powers*) untuk duduk di puncak tatanan hierarki sistem internasional sebagai pengatur utama didalamnya dengan superioritas kekuatan dan tumbuh sebagai aktor berpengaruh karena mempunyai reputasi dalam perang besar sebelumnya sebagai pemenang (Lemke, 2002, p. 22). Kedudukannya diakui berdasarkan pengakuan umum atas keunggulannya dalam politik dunia. Kekuatan dominan

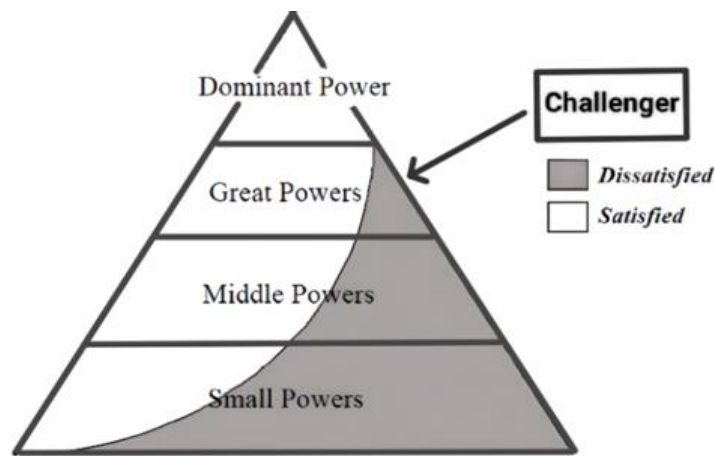
dipastikan oleh kombinasi besarnya kekayaan nasional, kekayaan per kapita, dan kecakapan militer yang luar biasa (Mesquita, 2013, p. 196). Artinya status kekuatan dominan hanya pantas disematkan kepada negara yang paling terkuat di dunia. Aktor ini dengan superioritas kapasitas yang dipunyai secara logis memiliki pengaruh yang sangat kuat. Namun kekuatan dominan tidak selalu menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk partikularisme yang merugikan negara lain dengan metode intimidatif represif. Pengerahan kekuatan lazimnya diaplikasikan dengan estimasi kepentingan vital yang dipertaruhkan. Aktor dominan global menyadari kekuatan adalah perangkat yang mahal dan karena kalkulasi tersebut digunakan secara cermat.

Hubungan kekuasaan antara negara-negara dalam konstelasi politik dunia hakikatnya dinamis berubah setiap harinya dengan peningkatan dan penurunan ekonomi meskipun dalam pandangan makroskopis perubahan tersebut sering kali tidak terdeteksi (Tammen, 2008, p. 320). Menyadari bahwa perubahan adalah ciri permanen politik dunia dan perubahan tersebut didorong oleh variabel ekonomi, kekuatan dominan taktis menerapkan dua skema strategis. *Pertama*, kekuatan dominan akan memiliki tendensi sikap preventif dalam menjaga kedudukannya dalam sistem agar tetap aman sebagai kekuatan dominan dengan konsisten memastikan keunggulan atas negara penantang yang berpotensi menjadi lawannya dengan menata sistem internasional di bawah aturan yang menguntungkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya (Tammen et al., 2000, p. 6). *Kedua*, dengan memanfaatkan superioritasnya, negara dominan mampu memproduksi seperangkat struktur politik dan ekonomi global dan untuk mempromosikan norma-norma perilaku yang meningkatkan stabilitas sistem (Levy, 2008, p. 12).

Tepat di bawah kedudukan puncak tatanan hierarki internasional ditempati oleh kekuatan besar (*great powers*). Sesuai dengan nomenklatur dalam hierarki piramida, kekuatan besar merupakan himpunan negara besar yang mempunyai tingkat kapabilitas kekuatan luar biasa tapi tidak melebihi negara dominan (Organski & Kugler, 1980, p. 19). Sebagai bagian dari komponen hierarki internasional, kedudukan kekuatan besar sangat berarti dalam menjaga stabilitas sistem dengan dijadikan instrumen oleh kekuatan dominan untuk mempertahankan *status quo*. Konsekuensinya sejumlah negara besar menjadi terintegrasi langsung dengan negara dominan untuk berbagi kepemimpinan dan mendapatkan keuntungan dari desain interaksi tersebut dalam tatanan internasional. Namun tidak menafikan pula terdapat entitas kekuatan besar yang merasa tidak puas dari skema interaksi tersebut dan tidak diperlakukan dengan baik oleh kekuatan dominan. Lebih lanjut, kekuatan menengah (*middle powers*) kedudukannya berada di bawah kekuatan besar dalam hierarki sistem internasional. Probabilitas tingkat kepuasan kekuatan menengah terhadap *status quo* besar adanya karena dukungan mereka terhitung penting dalam menjaga eksistensi *status quo* dalam sistem internasional. Tidak menutup kemungkinan pula ketidakpuasan timbul dan memilih untuk memihak kepada kekuatan besar yang mencoba mendekonstruksi tatanan sistem internasional dikendalikan *status quo* (Ikenberry & Moon, 2008, p. 126). Posisi paling bawah dalam hierarki internasional ditempati oleh kekuatan kecil (*small powers*). Negara-negara yang dikategorisasikan sebagai kekuatan kecil tidak dianggap sebagai ancaman bagi pemuncak hierarki.

2.2.2.3 Variabel Level Kepuasan Negara

Gambar 2.6 Level Kepuasan yang Diraih dalam Sistem Internasional



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Dalam teori hubungan internasional, banyak pendapat menuturkan bahwa ketegangan sistemis terjadi ketika kekuatan besar bangkit menantang seluruh atau sejumlah aspek tatanan internasional yang dibentuk dan dikendalikan oleh kekuatan hegemon. Penganut liberal dan realis sepakat bahwa stabilitas bisa terjadi dengan kondisi negara-negara yang berada di lapisan bawah hierarki global dapat tetap puas melalui konsensual atau koersi (Yilmaz & Xiangyu, 2019). Aliran pemikiran yang paling tertarik secara teoritis pada konsep variabel level kepuasan adalah teori *power transition*. Konsep hierarki internasional Organski bekerja secara sistematis dengan pemuncak hierarki internasional berperan sebagai organisator utama untuk menjaga stabilitas sistem. Dalam teori *power transition*, stabilitas internasional dipengaruhi oleh variabel tingkat kepuasan negara-negara terhadap tatanan yang dibentuk oleh pemuncak hierarki. Pemuncak hierarki sistem internasional merupakan inisator pembentukan tatanan dengan ciri khasnya sendiri. Maksudnya tatanan sistem internasional dibentuk dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang sebelumnya sudah dikalkulasikan oleh

pemuncak hierarki. Dengan begitu, sudah dipastikan kekuatan dominan sebagai pemuncak hierarki internasional merasa puas dengan tatanan hierarki internasional yang telah diciptakannya karena telah menerima banyak utilitas melalui aturan bentukannya sendiri yang melanggenkan dominasinya dalam sistem internasional.

Namun, tatanan yang dibentuk oleh pemuncak hierarki internasional tidaklah absolut bersifat oportunistis dan mengusung partikularisme. Karena teori *power transition* berasumsi keadaan *status quo* dapat berjalan dengan stabil apabila terdapat hubungan simbiotis antara pemuncak hierarki dengan kekuatan yang berada dibawahnya. Dalam membangun *status quo*, kekuatan dominan juga berkepentingan untuk menyebarkan kepuasan seluas mungkin dalam sistem internasional karena semakin minim gejolak dalam sistem internasional akan memudahkan negara dominan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan keuntungan politik (Lim, 2015, p. 283). Dominasi tidak dapat bertahan lama tanpa adanya dukungan politis dari segala lini kekuatan. Dukungan tersebut dapat tumbuh bilamana kekuatan dominan dapat menjamin level kepuasan kekuatan-kekuatan yang berada dibawahnya melalui kemanfaatan-kemanfaatan yang diraih dari tatanan sistem internasional inklusif yang telah dibentuknya.

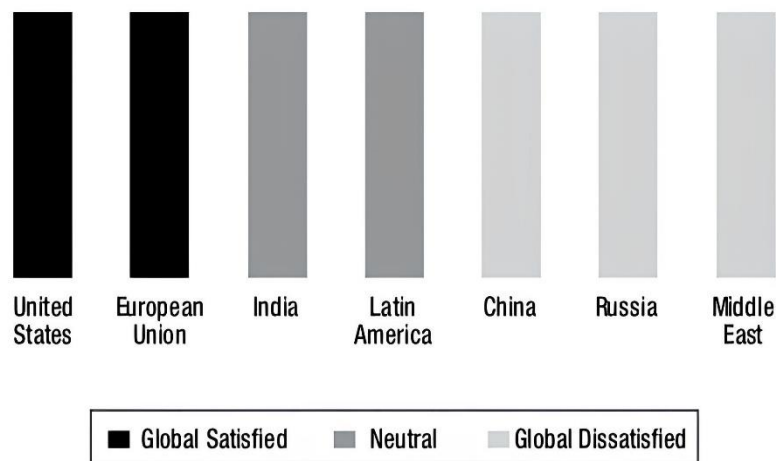
Walaupun semua lini kekuatan dalam proyeksi struktur hierarki internasional karya Organski memastikan mendapat kemanfaatan, tetapi takaran kemanfaatan yang didapat masing-masing kekuatan relatif berbeda. Kekuatan yang paling kecil mendapat kemanfaatan, maka dapat disimpulkan tingkat kepuasan terhadap tatanan sistem internasional sangat rendah. Disamping itu, di dunia yang sumber dayanya terbatas dan keamanan serta status bersifat relatif, pilihan yang diambil oleh

kekuatan dominan pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dalam piramida internasional. Garis demarkasi yang memisahkan antara negara puas-berkat aturan normatif sistem menjadikannya lebih makmur dan lebih aman-dari pihak tidak puas-yang cenderung memandang sistem internasional tidak memberikan jaminan kemanfaatan yang egaliter dan kepentingan jangka panjang, serta menilai sistem internasional tidak adil, korup, bias, dan didominasi oleh kekuatan yang saling berkonfrontasi-semakin kentara. Karena menihilkan keadilan dalam konteks utilitas yang diperoleh, negara penantang yang tidak puas berpotensi besar akan berkomitmen mengganti mekanisme tata kelola internasional. Argumentasinya adalah bahwa suatu negara yang merasa tidak puas, bilamana mempunyai surplus kekuatan nasional dan kemauan politik yang kuat akan tendensius menantang kekuatan dominan dengan berupaya memodifikasi seperangkat aturan normatif yang sudah ada untuk menciptakan realitas baru lebih menguntungkan. Sehingga, terkadang secara prosedural prosesnya berlangsung diikuti oleh konflik antarnegara (Yilmaz & Xiangyu, 2019). Dengan begitu, realitas politik dunia menyajikan fakta bahwa selalu ada kekuatan yang merasa tidak puas. Suatu negara mungkin tidak puas jika memandang sistem internasional yang sedang beroperasi sesuai norma dan aturan yang melemahkan kepentingan dan aspirasi negara yang bersangkutan. Rasa tidak puas mungkin disebabkan oleh latar belakang kondisi sejarah, ideologi, teritorial, atau kultural (Tammen et al., 2000).

Meskipun dikotomi antara negara yang puas dan tidak puas menjadi inti sari penilaisain teori *power transition* dalam bingkai prospek peperangan, konsep kepuasan (*satisfaction*) dan evaluasi *status quo* (*status quo evaluation*) masih belum tereksplorasi selama paruh pertama

eksistensinya. Riset pasca Perang Dingin menunjukkan progres positif meski teori ini belum memiliki metode yang diterima secara universal untuk mengestimasi tingkat kepuasan. Sedikitnya teridentifikasi sejumlah indikator yang digunakan teori ini, diantaranya yaitu indeks peningkatan pengeluaran militer, keselerasan tatanan sistem politik domestik, aliansi, dan partisipasi dalam lembaga-lembaga internasional (Lim, 2015, p. 284).

Gambar 2.7 Proyeksi Tingkat Kepuasan Negara dan Kawasan di Dunia terhadap *Status Quo*



Sumber : Tammen, R. L., & Kugler, J. (Eds.). (2020). *The Rise of Regions: Conflict and Cooperation*. Rowman & Littlefield Publishers.

Di level global, Amerika Serikat yang di dukung oleh dunia Barat dan sejumlah negara demokratis Asia menjadi kubu yang merasa puas. Tiongkok dan Rusia adalah aktor tergabung dalam kubu antagonis yang merasa tidak puas (Tammen & Kugler, 2020, p. 6). Indikator pertama yang diajukan oleh teori *power transition* untuk mengukur ketidakpuasan terletak pada pertumbuhan spektakuler dalam pengeluaran sektor militer. Karena negara dominan dipastikan berkomitmen menegasikan perubahan radikal -yang akan berdampak buruk pada kepentingan nasional- mendesak negara yang tidak puas untuk mengambil langkah strategis

dengan metode penggunaan kekuatan militer dalam misi merealisasikan antusiasme untuk mentransfigurasi wujud tatanan sistem internasional yang baru. Agar berhasil memberi perlawanan sistemis terhadap negara dominan, maka kekuatan penantang akan lebih mengakselerasi kinerja program pembangunan militer sebagai sinyalemen kuat mendekonstruksi *status quo* yang ada (Lim, 2015, p. 285).

2.2.2.4 Konsep *Power* dalam Teori *Power Transition*

Organski selaku inventor teori *power transition* memparafrasekan konsep *power* dengan sederhana sebagai metode untuk memengaruhi perilaku pihak lainnya. Dalam tingkatan internasional *power* hanya dapat beroperasi ketika adanya relasi antarnegara. Konsepsi *power* Organski merupakan sebuah gambaran suatu negara yang sanggup menciptakan pola interaksi bersifat koersif sehingga dapat memengaruhi negara lainnya sesuai dengan kehendaknya. Terciptanya situasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas *power* negara itu sendiri. Dalam teori *power transition* tidak ada faktor tunggal yang menjadi penentu *power* negara. Artinya, banyak variabel yang dijadikan indikator untuk menilai kapabilitas *power* suatu negara sehingga dapat diperhitungkan dalam sistem internasional. Teori *power transition* mendalilkan parameter *power* suatu negara dinilai berdasarkan dengan tiga elemen utama, yaitu populasi atau demografi, perkembangan ekonomi, dan perkembangan politik (Tammen et al., 2000, p. 16).

Dari ketiga variabel penentu *power* suatu negara, elemen populasi merupakan *sine qua non* (aspek penting sehingga harus ada) bagi status *power* negara di sistem internasional. Populasi dapat dikatakan identik dengan kedudukan tinggi suatu negara dalam hierarki interanasional ketika dimobilisasi menjadi kekuatan produktif (Tammen et al., 2000, p.

18). Maknanya populasi yang besar dan berkembang adalah individu-individu berbakat yang memberi optimisme bagi negara karena dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Kuantitas populasi juga dapat dimanfaatkan untuk komponen militer negara.

Perkembangan politik domestik suatu negara turut diperhitungkan dalam penentuan *power* suatu negara. Perkembangan politik hakikatnya bersangkutan dengan efektivitas sistem politik suatu negara dalam memobilisasi dan mengekstrasi sumber daya manusia dan material yang menjadi bahan acuan peningkatan kekuatan negara. Efektivitas juga membutuhkan kapasitas pemerintah untuk membuat keputusan yang berdampak positif terhadap ekonomi negara, politik luar negeri atau kebijakan luar negeri, dan kekuatan militernya. Sementara perkembangan ekonomi negara mensyaratkan tahapan industrialisasi. Bilamana suatu negara dengan populasi besar sedang dalam tahapan industrialisasi, maka akan berpotensi untuk meningkatkan *power* negara melalui instrumen ekonomi atau kekayaan (Unoki, 2016, pp. 18–20).

2.2.3 Model Hierarki Regional (*Multiple Hierarchy Model*) Douglas Lemke

Sejarah dunia penuh dengan cerita kontes konflik berdarah untuk dominasi sistemis. Bahkan telah terjadi sejak periode klasik mengisahkan tentang agresi antara Athena dan Sparta yang terangkum dalam Perang Peloponesia untuk merebutkan dominasi sistemis atas dunia Yunani kuno. Thucydides menganalisa alasan logis pecahnya perang tersebut yang dilatarbelakangi oleh pertumbuhan pesat kekuatan Athena yang mengkonsolidasikan kekuatan polis dalam Liga Delian (*Delian League*) telah menimbulkan rasa takut kekuatan Sparta (Lai, 2011, p. 8). Potret peristiwa konflik perebutan dominasi sistemis tersebut masih tetap eksis di dunia kontemporer yang dapat dideskripsikan dan diekplanasi secara logis dan

saintifik melalui konsep dan teori *power transition*. *Power transition* lazimnya digambarkan sebagai siklus perebutan dan peralihan status puncak kedudukan yang terjadi dalam sistem internasional. Karena itu, gesekan antarnegara sangat mungkin terjadi yang berpotensi besar menimbulkan situasi konflik dalam lingkungan arena politik dunia. Hal tersebut menjadi menjadi sinyal awal *power transition* tengah berlangsung.

Lebih lanjut, Organski dan Kugler mengidentifikasi konflik dalam peristiwa *power transition* dapat terjadi dengan dua indikator, yaitu adanya paritas *power* (*power parity*) dan rasa tidak puas (*dissatisfied*) terhadap sistem internasional. Paritas *power* dalam fenomena *power transition* merupakan kondisi suatu negara muncul sebagai kekuatan penantang dengan peningkatan signifikan yang kapabilitasnya hampir mendekati atau seimbang dengan negara pemuncak hierarki dalam sistem internasional. Karena itu, ciri utama aktor penantang terhadap kedudukan *status quo* ditandai dengan adanya perkembangan kapabilitas *power* kekuatan besar yang signifikan dan memupuk hasrat untuk mempertahankan konsistensi perkembangan tersebut yang dapat memberi optimisme dalam mengimbangi, bahkan melampaui pemuncak hierarki internasional. Perihal tersebut dilalui oleh tahapan awal restrukturisasi tatanan domestik melewati metode pembangunan dalam bingkai politik dan ekonomi dari negara penantang menuju taraf berkembang dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai kunci perubahan.

Adanya paritas *power* menjadi pemantik ketegangan antara kedua kekuatan tersebut. Eskalasi ketegangan semakin niscaya ketika kekuatan penantang tumbuh lebih cepat dari kekuatan dominan dengan dihindangi oleh rasa tidak puas yang menghasilkan ambisi untuk merevolusi tatanan sistem internasional (Kugler & Organski, 2000, p. 182). Dalam konsepsi

hierarki internasional Organski, potensi munculnya aktor penantang terhadap kekuatan dominan (*dominant powers*) datang dari kekuatan besar (*great powers*) yang berkembang meningkat. Secara teoritis, kekuatan besar menempati bagian struktural dari hierarki internasional yang dijadikan sekutu-sekutu kuat untuk melanggengkan dominasi. Artinya, semua kekuatan besar mendapatkan kemanfaatan dari sistem internasional walau dalam takaran relatif berbeda.

Akan tetapi diantara kekuatan besar seringkali muncul negara yang merasa tidak puas. Rasa tidak puas dapat dilatarbelakangi oleh basis keyakinan terhadap sistem internasional yang diatur oleh pemuncak hierarki tidak memberikan kemanfaatan secara adil bagi semua lini kekuatan dengan indikasi banyaknya tindakan culas. Lebih spesifik, rasa tidak puas ditimbulkan oleh faktor kepemimpinan internasional beserta aturan dan norma yang dibentuknya dalam sistem internasional (Tammen et al., 2000, p. 9). Sementara pemimpin sistem tidak akan tinggal diam ketika kedudukannya mulai tergoyahkan oleh kemunculan rasa tidak puas yang ditikuti oleh pertumbuhan penantang. Alhasil di level global terjadi gejolak konflik antar kekuatan untuk memperebutkan dominasi.

Konflik peralihan kepemimpinan dalam hierarki internasional tidak selalu ditafsirkan sebagai agresi senjata. Prakondisi yang jarang terjadi untuk mengundang peperangan hebat memang ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodasinya secara persuasif. Karena tidak semua sirkulasi pergantian kepemimpinan global ditempuh dengan peperangan, melainkan dapat terjadi dengan stabil tergantung variabel yang memengaruhi pemuncak hierarki. Interaksi damai muncul ketika pihak yang merasa tidak puas dibujuk untuk mengasosisikannya dalam tatanan *status quo*. Sebagaimana peralihan dominasi kekuatan

Inggris menuju dominasi Amerika Serikat berjalan dengan damai dan berhasil membina aliansi dalam jangka waktu yang lama. Ini terjadi menurut Organski karena dipengaruhi oleh Inggris memberi toleransi adanya peralihan kepemimpinan karena Amerika mengadopsi *quid pro quo* (transaksi politis) perdamaian, serta telah menghormati status internasional Inggris. Dengan metode ini, kebangkitan Amerika Serikat bermanfaat bagi kedua belah pihak (Organski, 1968, p. 363). Ringkasnya, transaksi bersifat politis menjadi variabel yang memengaruhi stabilnya peralihan global Inggris menuju dominasi Amerika Serikat. Meskipun sempat mendapat tantangan dari kekuatan Uni Soviet dalam Perang Dingin, potret konstelasi kekuatan global dalam konteks modern ini tetap secara konsisten menempatkan negara Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Kedudukannya di dunia kontemporer berada di puncak hierarki yang menyandang status kekuatan dominan dalam struktur hierarkis global.

Formulasi teori Organski sejauh ini secara eksklusif menyoroti interaksi *dyadic* antara negara-negara besar yang menjadi bagian tradisi lama dalam riset penelitian politik internasional. Jika menilik intensitasnya, *power transition* antara sejumlah negara terkuat dunia merupakan fenomena yang membutuhkan waktu yang relatif lama karena menyangkut pembangunan secara gradual dalam lingkup internal negara. Sementara mayoritas konflik dalam sistem internasional terjadi dalam interaksi regional. Bagi teori *power transition*, perluasan cakupan spasial bukan sebuah kendala. Banyaknya sokongan empiris terhadap teori *power transition* mencintipatakan sebuah konsensus awal diantara para peneliti hubungan internasional bahwa kemungkinan konflik meningkat secara

dramatis ketika kedua negara memiliki kedudukan setara dan menurun pada saat penantang memiliki kekuatan yang sangat berbeda.

Terindikasi perluasan logis bahwa korelasi antara kesetaraan dan konflik dapat diaplikasikan pada negara-negara kecil maupun besar yang terjadi di sub-sistem regional juga pada keseluruhan sistem internasional. Jika konflik-konflik yang dideskripsikan dalam teori *power transition* adalah pertarungan tinju dan bukan perang antarnegara, maka hanya pertarungan perebutan gelar kelas berat saja yang relevan dengan teori tersebut. Dalam teoretisi mutakhir, asalkan negara-negara besar tidak melakukan intervensi, teori *power transition* berlaku untuk semua divisi, dari kelas terbang (negara kecil) hingga kelas berat (negara besar) (Tammen et al., 2000, pp. 63–64). Dengan begitu, rumusan kontemporer teori ini meliputi ekstensi kajian dan secara empiris menguji hipotesis pada himpunan data yang mencakup negara besar dan kecil. Kontinuitas terpenting dalam evolusi teori *power transition* adalah hasil riset Douglas Lemke yang berisi teoretisi pemikiran Organski dalam konteks lebih modern dengan memperluas logika teori ini yang mencakup subsistem regional. Hal ini bersifat modern dalam arti bahwa tulisan Douglas Lemke bagian dari program riset teori *power transition* dengan tetap mempertahankan kontinuitas asumsi dasar otentik dari teori *power transition* dan menambah proposi umum lainnya, yaitu secara teoretis memodifikasi model hierarki internasional dalam ruang lingkup teori *power transition* dengan memberlakukan operasi struktur hierarki tingkat global ke dalam unit regional dengan mengambil sampel dari sejumlah fakta empiris di pelbagai kawasan (Lemke, 2002).

Secara normatif dalam program riset imre lakatos, perluasan teori *power transition* yang dikemukakan Lemke tidak bertentangan dengan

heuristik positif. Maka, teori ini bersifat progresif berdasarkan kriteria Lakatosian dengan menyumbangkan elemen heuristik positif dari program penelitian, yaitu membangun model yang memperluas logika teori *power transition* ke susbsitem negara (termasuk hubungan *dyadic*) yang berada di dalam tatanan internasional. Karena model hierarki Douglas Lemke menghasilkan hipotesis mengenai perilaku negara kecil yang luput dalam formulasi otentik Organski, maka model ini jelas menghasilkan prediksi fakta-fakta baru dan akibatnya tidak bersifat *ad hoc* (DiCicco & Levy, 2003, pp. 133–134). Perluasan ini telah menjadi kunci masuk untuk membuka pemahaman terhadap politik kawasan. Perluasan ini mengandung penejelasan analitis tidak hanya sekedar mempersoalkan intergrasi regional, melainkan juga meninjau terhadap permulaan dan eskalasi konflik di kawasan.

Pada prinsipnya, model hierarki multiple Douglas Lemke juga memproyeksikan wujud pola piramida internasional Organski tetapi bersifat lebih kompleks karena di dalam struktur hierarki secara makro atau keseluruhan level internasional di dalamnya juga tersusun aneka konfigurasi piramida hierarki internasional bersifat mikro yang tersebar secara masif di seluruh dunia. Terjadi desentralisasi hierarkis yang beroperasi dalam lingkup regional di pelbagai belahan dunia. Piramida yang bersifat mikro ini representasi dari tatanan kekuasaan regional dalam sistem internasional. Sederhannya, semua tatanan internasional mikro tersebut merupakan sistem regional atau sub-hierarki dari keseluruhan hierarki sistem internasional. Model hierarki *multiple* memperluas pendekatan ini dengan mengikutsertakan negara-negara kecil sebagai objek pengkajian. Paralel dengan mekanisme piramida Organski, hierarki regional masing-masing dipimpin oleh satu negara

dominan yang berperan konstan mencermati interaksi regional yang tendensius terhadap upaya untuk mempertahankan *status quo* kawasan untuk meraup sejumlah kemanfaatan di dalamnya (Tammen et al., 2000, p. 64). Pembentukan seperangkat norma dalam tatanan hierarkis regional hakikatnya dipengaruhi oleh negara kawasan yang memiliki surplus *power* (dominan). Ini adalah konfigurasi sosialisasi politik tingkat regional melalui internalisasi nilai-nilai yang dianut secara universal. Hierarki regional ini tidak bersifat statis karena terus berubah bersamaan dengan perkembangan atau dekadensi kekuatan nasional. Dinamika ini menjadi determinan pokok terjadinya stabilitas atau instabilitas, pembangunan atau stagnasi di level regional. Sejarah mendokumentasikan dengan baik bahwa tidak ada negara unggul secara global maupun regional yang bisa mempertahankan status hegemoniknya secara infinit. Pengkajian terhadap kawasan memberikan perspektif ekstensif karena menjadi laboratorium yang menyediakan serbaneka sampel tragedi transisi *power*. Tragedi transisi *power* relatif sering terjadi di lingkungan kawasan dibandingkan dengan tingkat global karena adanya perbedaan besar dalam konteks level pembangunan antara sejumlah entitas (negara) mikro.

Secara prinsipiell logika tingkat ekuilibrium yang dicetuskan Organski diaplikasikan dengan menjadikannya determinan perdamaian dan konflik kawasan (Lemke, 2002, p. 49). Negara lainnya dalam hierarki regional dapat diuntungkan dan puas terhadap *status quo* atau dirugikan dan merasa tidak puas terhadap tatanan regional. Transisi *power* di tingkat kawasan terjadi apabila terindikasi negara penantang merasa tidak puas, berhasil mencapai paritas *power* dengan kekuatan dominan kawasan, dan menolak nilai-nilai kekuatan dominan regional, akibatnya

probabilitas konflik meningkat secara dramatis dalam lingkup regional. Dengan demikian, paritas *power* dan evaluasi negatif terhadap *status quo* diasosiasikan dengan perang dalam hierarki regional, seperti halnya dalam hipotesis teoretis dalam teori *power transition* Organski berkaitan dengan mekanisme peperangan dalam level global. Sebaliknya, jika negara kompetitor telah mencapai konsensus dengan kekuatan utama regional dan bersedia menerima nilai-nilai yang telah dibentuk dalam lingkungan penuh integritas dengan saling mempercayai, maka akan melanjutkan perdamaian kawasan secara kontinu meskipun terdapat perubahan kekuatan relatif. Stabilitas Terjamin bukan melalui mekanisme intimidasi atau konfrontasi, melainkan melalui pembentukan hubungan yang kuat dan semakin ditingkatkan melalui integrasi regional (Tammen & Kugler, 2020, p. 4).

Untuk lebih memahaminya maka harus memiliki definisi operasional mengenai hierarki regional. Banyak upaya ilmiah yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan, *subordinate state system*, *subordinate international system*, sub-sistem internasional, zona geografis, rezim, sub-sistem regional, dan lainnya yang berkaitan dengan pendefinisian terhadap terminologi spasial. Aneka kerisauan empiris dan sumber data telah dikorelasikan dengan berbagai upaya untuk mendefinisikan bagian-bagian penting dari sistem internasional. Kualifikasi yang digunakan untuk membangun subunit sistem internasional meliputi aspek kesamaan budaya, mekanisme perniagaan internasional, keanggotaan dalam organisasi internasional, pola aliansi, dan kesamaan demografi. Memfiltrasi segenap kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terindikasi dua karakteristik umum yang digunakan secara proporsional untuk mendefinisikan kawasan, yaitu :

faktor kedekatan (*proximity*) dan desain interaksi (*pattern of interaction*) (Tammen et al., 2000, p. 66).

Keberadaan garis perbatasan internasional seringkali menjadi katalisator dalam peperangan. Bukan berarti garis perbatasan yang menyebabkan perang, melainkan karena gejala kedekatan. Kedekatan meningkatkan interaksi, memaksa aktor negara untuk menanggapi secara konkret, dan meningkatkan potensi perselisihan. Sejumlah kalangan menuturkan *territoriality* membuat manusia sensitif terhadap ruang yang mereka tinggali dan ancaman terhadapnya. Karena kedekatan meningkatkan intensitas interaksi, dan manusia sensitif terhadap interaksi yang melibatkan teritorial, maka potensi konflik kian meningkat. Artinya, kedekatan teritorial diantara negara akan memengaruhi mekanisme penilaian terhadap potensi ancaman terhadap keamanan. Mengestimasi sejumlah variabel di atas, hierarki regional dipahami sebagai wilayah yang relevan secara politik bagi kekuatan kecil yang saling tumpang tindih. Wilayah yang relevan secara politik untuk negara manapun adalah bagian dari permukaan bumi yang menjadi atensi bagi negara itu sendiri. Negara dengan kekuatan besar akan memiliki kapasitas pandangan yang lebih bersifat makro. Sementara negara yang relatif lemah memiliki keterbatasan dalam memandang persoalan internasional secara holistik karena tidak mempunyai surplus sumber daya yang berguna untuk menangani sejumlah permasalahan yang berada jauh di luar jangkauan dari wilayah mereka. Prosedur yang digunakan untuk pendefinisian operasional hierarki regional secara eksplisit mengasumsikan bahwa negara-negara memberikan perhatian eksklusif pada wilayah di mana mereka dapat menggunakan pengaruh militernya. Hal ini tidak berarti pemuncak hierarki kawasan akan mengabaikan

keberadaan adikuasa, namun ketika memformulasikan politik luar negeri dan membuat keputusan rencana strategis hanya akan bersifat regional (Tammen et al., 2000, p. 67).

Secara fungsional mekanisme hierarki kawasan cerminan sempurna dari hierarki global. Dikala kekuatan dominan global menetapkan *status quo* global yang menguntungkan dirinya sendiri, negara dominan di kawasan akan mereplikasi metode yang serupa. Selanjutnya, aspek interaksi internasional apa saja yang dibayangkan oleh kekuatan dominan kawasan ? Meski tidak ada jawaban yang pasti, kekuatan dominan kawasan akan berkuat pada isu-isu strategis regional seperti akses terbuka terhadap wilayah strategis atau wilayah dengan nilai geopolitis tinggi secara prosedural menjadi variabel sentral. Sebagian besar konflik skala regional terjadi dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mengambil keuntungan teritorial. Kekuatan global dalam kacamata makro tidak mempersoalkan subjek spesifik yang mengendalikan kawasan di pelbagai belahan dunia selama kekayaan mineral yang dikuasai dimobilisasi dengan mekanisme ekspor dan tidak mereduksi eksistensi *status quo* global. Dengan begitu, mendapatkan akses secara bebas terhadap pelbagai wilayah menjadi integral dengan kekuatan dominan kawasan. Berdasarkan hal tersebut, mengundang sejumlah kerangka berpikir terhadap tata kelola terhadap komponen geopolitik maupun geostrategis seperti mendapat akses terhadap ruang lalu lintas pelayaran, memproteksi integritas wilayah, serta mengakses wilayah subur dan kaya akan cadangan mineral. Lebih lanjut, *status quo* kawasan tidak hanya dikaitkan dengan isu aspek spasial, melainkan juga berkuat pada isu-isu non-teritorial seperti mengenai masalah etnis, militer, ekonomi, bahkan ideologi, yang seringkali segenap isu tersebut diposisikan secara

diamteral dengan kekuatan penantang (Tammen et al., 2000, pp. 68–69). Misalnya, fakta empiris yang telah terjadi di dalam hierarki regional Asia Tenggara yang dikendalikan secara ideologis oleh kekuatan besar eksternal pada dekade 70-an dengan menempatkan Vietnam sebagai kekuatan dominan kawasan.

Dengan demikian, karakteristik dari hierarki regional memberi sinyalemen kuat adanya potensi intervensi kekuatan besar global menyangkut persoalan strategis spesifik yang taktis ditanggapi dengan mengerahkan segenap kekuatan material (Lemke, 2002, p. 50). Isu mengenai teritorial lazimnya tidak menjadi magnet yang menarik perhatian kekuatan besar eksternal dengan alasan sederhana bahwa selama sumber daya yang terkandung tersedia untuk diekspor maka akan menafikannya dari peta kepentingan strategis. Ongkos mahal sebagai kekuatan utama global hanya dialokasikan untuk permasalahan strategis bersifat makro (global). Namun, ketika *status quo* ditautkan dengan sejumlah kepentingan yang bersifat krusial dari kekuatan global, kemungkinan besar akan ikut serta dalam konstelasi regional. Artinya, adanya kepentingan dan intervensi kekuatan global kemungkinannya besar terjadi jika kekuatan dominan regional lebih menonjol secara eksternal. Dengan begitu, desain interaksi antar kekuatan dominan lintas hierarkis yang terjadi hanya terjadi satu arah, yaitu dengan mekanisme *top-bottom* yang melegitimasi ikut campur kekuatan besar eksternal terhadap isu domestik kawasan dalam tatanan regional tertentu. Sebaliknya, kekuatan dominan regional secara praktis impoten dalam intervensi struktur hierarki global. Secara pasti, hipotesis dasar dari model hierarki *multiple* dalam teori *power transition* adalah jika semakin

banyak absensi campur tangan kekuatan global, maka hierarki *multiple* beroperasi langgeng sebagai sistem internasional paralel yang lebih kecil.

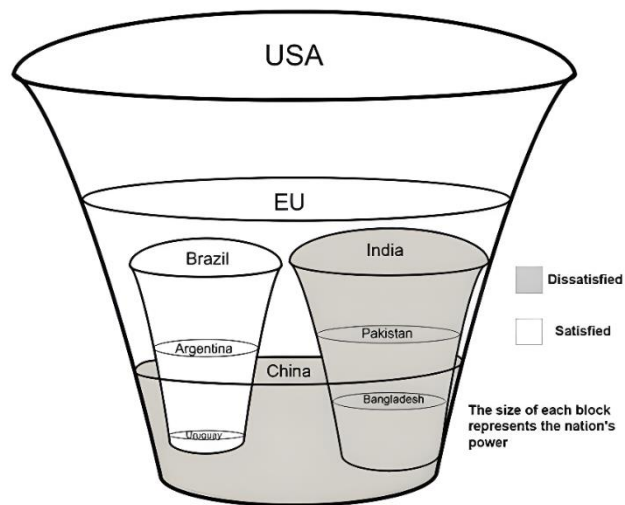
Dengan demikian, hipotesis utama hierarki *multiple* hanya berlaku ketika ketidakhadiran intervensi dari pihak eksternal (Tammen et al., 2000, p. 70). Jikalau sampai intervensi terjadi, maka keberadaan kekuatan global akan mendistorsi pola yang konsisten antara karakteristik struktural seperti evaluasi kekuasaan relatif atau *status quo* dan terjadinya konflik antara negara-negara kecil di kawasan. Alhasil eksistensi dan mekanisme hierarki *multiple* menjadi impoten (Lemke, 2002, pp. 52–53). Oleh karenanya sebagai tindakan preventif agar menjaga eksistensi sebagai hierarki regional yang otonom, kekuatan dominan kawasan harus mengantisipasi campur tangan pihak eksternal. Konsekuensi praktisnya, kecuil kemungkinan negara dominan kawasan untuk ikut dalam pusaran konflik yang dapat memicu keikutsertaan kekuatan global karena dapat mendekonstruksi tatanan regional yang menegaskan kendali mereka atas tatanan regional. Secara simpleks, semua tatanan regional diharuskan patuh pada format hierarki global yang implikasinya menguntungkan kekuatan global.

Singkatnya, tujuan utama model hierarki *multiple* adalah konseptualisasi aneka macam sub-sistem internasional dengan pelbagai hierarki kekuasaan yang secara kumulatif membentuk sistem internasional. Argumen teori *power transition* tradisional Organski hanya berfokus pada sistem global (hierarki global) secara keseluruhan dan hubungan antarnegara-negara besar yang kedudukannya bertempat di puncak hierarki. Hipotesis dari teori Organski ini ketika hierarki global mulai direduksi oleh kebangkitan kekuatan lainnya yang merasa tidak puas dan mencapai kesetaraan material dengan negara dominan,

probabilitas konflik desktruktif besar terjadi. Model hierarki *multiple* mempertahankan potret tradisional sistem internasional dan hipotesis tradisional tentang konflik antara negara-negara besar, namun memperluas ruang lingkup kajian dengan menambahkan gagasan mengenai hierarki kekuasaan regional yang banyak tertanam dalam hierarki internasional secara masif.

Dalam masing-masing hierarki lokal hakikatnya teridentifikasi sejumlah *status quo* regional yang diejawantahkan oleh negara dominan regional. Seperti halnya dalam hierarki global, pastinya negara-negara dominan di setiap regional dunia merupakan entitas aktor yang mempunyai dimensi keunggulan kekuatan nasional yang dicapai dengan proyek pembangunan di lingkungan domestik. Jika resistansi hierarki regional mulai terkoyak dan penantang lainnya di lingkup kawasan tidak puas, estimasi konflik semakin meningkat. Hierarki regional beroperasi secara paralel dengan hierarki kekuasaan global secara keseluruhan selama negara-negara besar global tidak ikut serta. Dengan demikian, model hierarki *multiple* menawarkan argumentasi teoretis yang konsisten tentang kondisi konflik antara negara-negara besar beserta konflik antara negara-negara kecil (Lemke, 2002, pp. 56–57). Karya Douglas Lemke berfokus pada Dunia Ketiga dan studi permulaannya hanya terbatas pada ulasan analitis kawasan Amerika Selatan yang berhasil mengidentifikasi sejumlah bentuk hierarki regional. Dalam perkembangannya, teoretikus menggunakan pendekatan Lemke untuk menganalisa secara teoretis objek hierarki dalam lingkup geografis lainnya yang tersebar di pelbagai belahan dunia (Cashman, 2013, p. 419).

Gambar 2. 8 Pola Interaksi Hierarki Global dan Regional



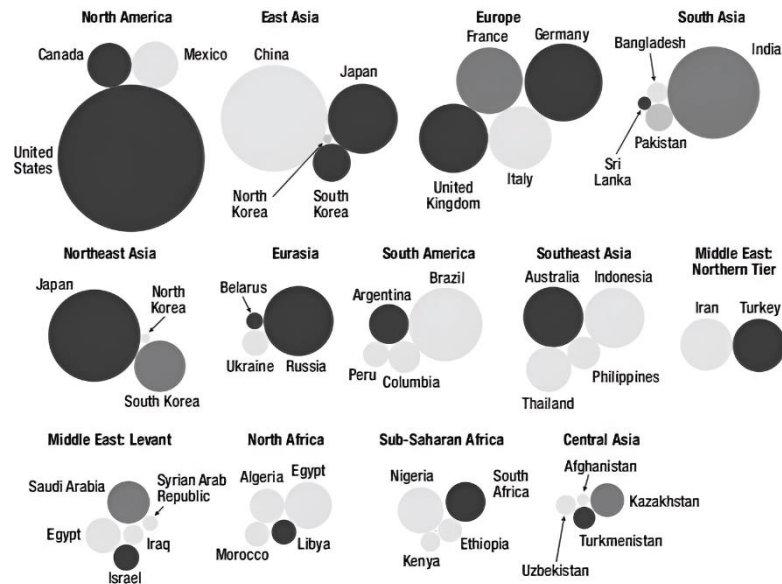
Sumber : Tammen, R. L., Kugler, J., & Lemke, D. (2017). Foundations of power transition theory. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*

Gambar 2.9 Potret Kawasan



Sumber : Tammen, R. L., & Kugler, J. (Eds.). (2020). *The Rise of Regions: Conflict and Cooperation*. Rowman & Littlefield Publishers.

Gambar 2. 10 Postur Relatif Hierarki Regional di Dunia



Sumber : Tammen, R. L., & Kugler, J. (Eds.). (2020). *The Rise of Regions: Conflict and Cooperation*. Rowman & Littlefield Publishers.

Ketiga gambar di atas memproyeksikan penggalan kawasan yang tersebar di permukaan bumi yang mengkonfigurasi peta dunia, ilustrasi sederhana dari kompleksitas evolusi konsep mutakhir teori *power transition* yang menyajikan pola mekanisme interaksi hierarki global dan regional dengan mengambil sampel sejumlah kawasan, serta postur relatif dari masing-masing hierarki regional pada masa kini. Tercantum desain interaksi antarnegara namun dalam hierarki yang berbeda. Pastinya tata letak keseluruhan kawasan tersebut terpisahkan oleh komponen geografis dan faktor lainnya. Oleh karena itu, masing-masing hierarki kawasan dipimpin oleh aktor negara yang berbeda.

Hierarki kawasan yang terletak di Benua Amerika menjadi yang paling stabil bila dikomparasikan dengan sejumlah wilayah lainnya. Setidaknya teridentifikasi dua tatanan hierarki regional yang ada di kontinental tersebut, yaitu hierarki kawasan Amerika Utara dan hierarki

Amerika Selatan. Amerika Utara sebagai sistem internasional terdiri dari tiga negara : Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada tataran operasional, kawasan ini prototipe dari hierarki *multiple* yang beroperasi secara normal karena berhasil konstan mempertahankan kestabilannya. Kekuatan dominan kawasan bisa jadi sama dengan kekuatan utama global (Kim, 2008, p. 125). Karena itu Amerika Serikat secara struktural selain berperan selaku *status quo* global, juga menjadi kekuatan paling unggul sehingga melegitimasi kedudukannya di puncak hierarki regional. Keunggulan tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai magnet yang menarik Kanada dan Meksiko untuk merangkai skema kedekatan strategis dengan skenario stabilitas kawasan *oscillation*, yaitu model proses politik magnetis dengan menempatkan negara terkuat sebagai inti yang menarik negara kecil lainnya untuk saling bersinergi, tetapi dalam batasan persoalan spesifik akan menjaga jarak dengan kekuatan utama untuk melindungi aspek independensi dan kedaulatan negara kecil (James & Hristoulas, 2020). Amerika Selatan menjadi kawasan lainnya yang memenuhi kriteria selaku sampel utuh dari bentuk struktur regional otonom dan stabil karena disparitas terjaga secara konsisten selama sekian abad yang hingga kini Brazil berada di puncak tampuk kekuasaan hierarki regional Amerika Selatan. Ketidakhadiran intervensi regional oleh kekuatan besar global otomatis sistem hierarki regional Amerika Selatan tetap eksis menjadi model sub-sistem yang bekerja secara normal paralel dengan struktur global selama negara besar puas dengan kinerja aktor dominan regional (Tammen et al., 2017). Meski historisitas kawasan menjadi induk kelahiran kekuatan besar dan ruang strategis bagi sejumlah tragedi konflik besar, hierarki regional Eropa kontemporer juga dianggap serupa dengan kawasan Amerika Utara sebagai kawasan yang stabil dan

kooperatif. Integrasi adalah corak khas dari kawasan ini yang melibatkan peran sentral Jerman dalam mengembangkan Uni Eropa.

Bila berpedoman pada ilustrasi peta persebaran kawasan dunia di atas, menggarisbawahi daratan Afrika terbagi menjadi dua kawasan diantaranya ialah Afrika Utara dan Sub-Sahara. Peta kekuatan politik regional di Afrika Utara dilihat secara matematis terpolarisasi dalam dua kekuatan yang memiliki pengaruh, yakni negara Mesir sebagai poros utama dan diikuti oleh Aljazair. Keduanya terpisahkan secara alamiah oleh hamparan gurun yang mengisolasi kapasitas prospek pola interaksi secara langsung. Terlebih koordinasi tingkat regional minim dilakukan karena negara-negara Afrika Utara secara diplomatis lebih berhaluan kepada negara ekstra kawasan, terutama negara-negara Eropa untuk menjalin kemitraan dalam aneka sektor strategis. Fokus non-regional negara-negara Afrika Utara mungkin disebabkan oleh warisan kolonial. Hingga memasuki periode pasca-kolonial berkembang hingga pada titik negara-negara intra kawasan hanya berkomitmen terhadap negara eks-kolonial. Karakteristik ini berdampak pada kawasan ini bergantung pada negara-negara di luar hierarki dan kurang terintegrasi secara ekonomi bila disandingkan dengan Amerika Latin yang juga memiliki sejarah kolonial. Oleh sebab itu, integrasi regional tidak menjadi prioritas bagi negara-negara Afrika Utara (Bangherpour & Singer, 2020, p. 155). Desain interaksi yang dipertontonkan di kawasan Afrika Utara telah menggeser fokus dari logika *teori power transition* yang lebih relevan dipakai ketika mengkaji konflik intra negara yang sebagian besar negara kawasan dirundung oleh pergolakan politik telah membentuk polarisasi kekuatan domestik. Sementara di bagian Sub-Sahara, hierarki regional didominasi oleh Nigeria dan Afrika Selatan dalam skala lebih kecil. Hanya saja

keduanya secara teknis tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan stabilitas kawasan karena stagnasi pembangunan domestik. Justru mobilitas sejumlah kekuatan global lebih mengendalikan kawasan ini (Coulombe & Johnson, 2020).

Fakta geografis benua Asia adalah sebagai benua terluas di planet bumi yang menjadi rumah bagi sejumlah mikro kawasan dengan profil berbeda (Timur Tengah: Syam dan *Nothern Tier*, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara). Pluralitas menghadirkan kompleksitas realitas ketika menilik secara general kawasan di benua Asia. Bahkan banyak yang menilai kawasan di Asia pantas mendapat reputasi sebagai paling tidak stabil di dunia. Tidak mengherankan, ada alasan logis mengapa disharmoni menjadi situasi yang melekat dengan kawasan Asia. Deretan eskalasi konflik regional dan kehadiran sejumlah kekuatan besar dunia menyimpan kepentingan strategis menjadi katalis instabilitas kawasan. Secara potensial, ritme konflik akan berjalan persisten mengingat kebangkitan negara berkembang di kawasan-kawasan Asia berhasil secara sistematis memobilisasi surplus sumber daya yang positif bagi intensifikasi kekuatan nasional.

Kawasan Timur Tengah selalu menjadi objek reportase internasional karena segudang kegaduhan yang menjadi sinyalemen konflik regional. Diskursus utama yang mengisi ruang publik kawasan bekuat pada problem klasik berkaitan dengan resolusi konflik Israel-Palestina. Sebagaimana hipotesis teoretis teori *power transition*, konkretisasi stabilitas regional hanya dapat terjamin oleh adanya kekuatan dominan yang memproduksi seperangkat aturan normatif dalam hierarki kawasan. Untuk saat ini kedua faktor tersebut masih bersifat potensial dan dikontestasikan di kawasan Syam. Sedikitnya Arab Saudi, Israel, dan

Mesir menjadi garda terdepan untuk mendominasi kawasan dengan keunggulan kekuatan nasional masing-masing (Rabinowitz & Kelani, 2020, p. 126). Seperti halnya di Afrika Utara, negara-negara di kawasan Syam mengalami disintegrasi domestik. Rivalitas antara oposisi dan petahana dalam hierarki domestik negara yang dikombinasikan dengan dimensi dogmatik atau sektarianisme (Wahabisme, Sunni, Syiah) implikasinya menghadirkan konflik yang semakin kompleks karena telah dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok) untuk dijadikan wilayah proksi dengan tujuan mendapatkan kepentingan strategis masing-masing (Rabinowitz & Kelani, 2020, pp. 132–133). Ketiga poros kekuatan regional yang disebutkan sebelumnya saling memiliki koneksi stabil dengan merangkai kemitraan dalam bingkai ekonomi dan militer sebagai upaya strategis untuk mempertahankan stabilitas kawasan. Arab Saudi memulai hubungan bisnis dan politik-militer dengan Israel untuk kepentingan geostrategis, yaitu untuk mengendalikan Iran di pusran konflik Yaman dan Suriah (Rabinowitz & Kelani, 2020, p. 130). Mesir menormalisasi hubungan diplomatik dan kemudian diikuti oleh menjalin sinergisitas dengan Israel dalam agenda anti-terorisme secara taktis untuk menghadapi kelompok radikal Hizbullah dan Hamas. Dalam perspektif ekonomi, normalisasi didesak dengan motivasi geopolitik untuk mendapat akses terhadap gas alam (Rabinowitz & Kelani, 2020, p. 131). Dalam perspektif yang lebih visioner, melalui sejumlah aktor diproyeksikan untuk berperan selaku stabilitator kawasan, sedikitnya dalam skala kecil diharapkan mampu menyelesaikan konflik pelik Palestina.

Asia Tengah jika melihat posisi geostrategisnya yang dikelilingi oleh sejumlah kekuatan Asia yang berpotensi melawan tatanan Amerika

Serikat, maka hierarki kawasan ini menjadi alasan sentral untuk mengevaluasi stabilitas regional (J. Patrick Rhamey, 2020, p. 224). Kawasan Asia Tengah memiliki rentetan sejarah panjang sebagai ruang strategis yang digunakan oleh negara-negara besar untuk memperluas pengaruhnya yang menjadi eksplanatori bagi terjadinya beberapa peristiwa konflik terbuka, instabilitas internal, dan konflik proksi. Abad ke-19 kawasan Asia Tengah menjadi saksi bisu paritas *power* antara Inggris dan Rusia (J. Patrick Rhamey, 2020, p. 226). Selama Perang Dingin wilayah Asia Tengah telah dikooptasi menjadi bagian integritas teritorial Uni Soviet sehingga kontestasi berkurang di kawasan ini (J. Patrick Rhamey, 2020, p. 228). Gambaran rivalitas masa lalu masih relevan namun dalam polaritas dan konfigurasi yang berbeda dimasa kini. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, menjadi aktor paling kentara dalam menavigasi arah masa depan kawasan. Maka dari itu prospek kawasan yang independen dan otonom sukar untuk direalisasikan.

Di Asia Timur, Tiongkok menempati urutan pertama dalam hierarki regional yang diikuti oleh sejumlah kekuatan lainnya, yaitu Jepang, Korea Selatan, Korea Utara. Tiongkok adalah aktor tradisional sekaligus kekuatan dominan regional Asia Timur yang kini memiliki aspirasi dan komitmen untuk hadir secara makro di lingkungan strategis internasional. Pengaruhnya semakin masif memengaruhi sejumlah kawasan di pelbagai dunia seperti Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan sejumlah negara di benua Eropa (Tammen & Kugler, 2020, p. 15). Masa depan adalah tanah yang belum pernah dijejaki. Masa depan hanya dapat dijelaskan dalam bentuk probabilitas. Dalam konteks ini, terdapat probabilitas tinggi bahwa Tiongkok akan menjadi pemimpin dunia bersendikan pada akumulasi pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, kekuatan militer, dan pengaruh

politik. Inisiatif *Belt and Road* dapat mendefinisikan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Jika membuahkan hasil positif, pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok meningkat signifikan dan memastikan transisi dari kekuatan regional menjadi kekuatan utama global (Gao & Yang, 2020, p. 38). Mesti menjanjikan kemanfaatan, dalam hal praktis menjumpai tantangan besar yang harus ditanggulangi seperti eskalasi hubungan diplomatik Amerika dengan sejumlah negara di pelbagai kawasan dengan motif untuk memblokir inisiatif geopolitik dan geostrategis tersebut (Gao & Yang, 2020, pp. 41–47).

Serupa dengan Tiongkok, India menjadi kekuatan utama kawasan Asia Selatan yang berpotensi menjadi kandidat utama sebagai aktor yang mampu menciptakan skenario untuk mengkonfigurasi ulang hierarki dunia dikemudian hari. Peningkatan kekuatan nasional India dipengaruhi oleh jumlah demografi, produktivitas ekonomi, dan kapasitas politik. Selain India, peta kekuatan konstelasi di kawasan diisi oleh kekuatan Pakistan yang cenderung tidak puas, Bangladesh lebih bersikap koeksistensi, Srilanka yang menjaga netralitas, serta Bhutan dan Nepal sebagai negara lemah. Pakistan adalah kompetitor tradisional India dalam sejumlah konflik regional. Tidak ada perselisihan di regional Asia Selatan yang lebih eksplosif selain konflik klasik Kashmir antara India dan Pakistan. Konfrontasi persisten terus berlangsung dan perubahan-perubahan struktural secara makro yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah menciptakan kesenjangan kemampuan yang tidak dapat diatasi oleh India dan Pakistan. Dominasi India menunjukkan kemungkinan eskalasi hanya berskala kecil atau tidak akan mengundang perang konvensional kecuali terindikasi adanya infiltrasi kekuatan eksternal dalam konflik tersebut seperti Tiongkok. Suatu negara dapat memiliki

identitas hierarki ganda secara sekaligus. India memenuhi kriteria tersebut selaku kekuatan regional dan masuk dalam rivalitas hierarki global. Dalam ruang lingkup lingkungan eksternal kawasan, India terhubung melalui ikatan kolonial dengan Inggris dan semakin meningkatkan koneksi kerja sama dengan Amerika Serikat seiring dengan pergerakan Pakistan yang berhaluan kepada Tiongkok.

Dengan melihat ulasan holistik terhadap sejumlah dinamika kawasan di atas, kekuatan global seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok, adalah gembong kekuatan dunia yang mampu untuk mengintervensi untuk memengaruhi aneka peristiwa yang terjadi di suatu kawasan (Tammen et al., 2017). Meskipun Amerika Serikat menempati kedudukan di puncak hierarki dengan segala keunggulannya, namun bukanlah sebagai hegemon global karena dalam rangka mempertahankan dominasinya secara prosedural diaplikasikan dengan mekanisme mengasosiasikan dan mengelola sejumlah negara yang memiliki preferensi senada. Keunggulan bukan hanya dilihat dari segi akumulasi kekuatan atau tergantung pada sumber daya kekuatan nasional, tetapi juga pada kemampuan mengelola tatanan dunia (Acharya, 2018). Tatanan *status quo* saat ini dilegitimasi oleh dukungan politis Uni Eropa yang mewakili kepuasan koalisi dunia Barat dan menjadi pilar utama tatanan liberal Amerika Serikat.

Hanya saja, dominasi Amerika Serikat yang telah dipertahankan sekian dekade kini secara gradual mulai terdegradasi ketika gelombang kebangkitan mulai menghinggapi sejumlah negara yang berpotensi besar untuk mendesain ulang dan mendefinisikan masa depan tatanan dunia internasional. Namun pastinya kondisi mutakhir dunia internasional, Amerika Serikat sedang dihadapkan pada tekanan sistemis ketika

Tiongkok bangkit menantang telah menjadi patologi yang dapat mereduksi resistansi hierarki global. Di tingkat lingkungan regional Indo-Pasifik mereplikasi situasi strategis serupa ketika meninjau sejumlah mikro kawasan lainnya yang menjadi bagian proyek pembentukan mega kawasan tersebut, seperti Asia Selatan, Asia timur, dan Asia Tenggara. Sebagaimana paparan sebelumnya, abnormalitas dalam segi operasional menyelimuti ketiga hierarki regional tersebut disebabkan oleh presensi rivalitas kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok. Mengingat pluralitas ide dan gagasan format interaksi yang masih menjadi wacana, prospek terbentuknya tatanan regional berifat nihil. Ketiadaan format tatanan regional semakin menguatkan disharmoni selaku kondisi faktual kawasan Indo-Pasifik.

2.2.4 Teori Kepentingan Nasional (*National Interest Theory*)

Dinamika perkembangan konsep kepentingan nasional hakikatnya sejalan dengan berakhrinya peristiwa evolusioner internasional yang di dalamnya mendokumentasikan peperangan besar dengan basis keagamaan di kontinen Eropa. Perjanjian Perdamaian Westphalia menjadi tanda berakhirnya peperangan tersebut sekaligus mendekonstruksi tatanan sistem internasional tradisional yang sebelumnya hanya didominasi oleh kekuasaan Gereja sebagai subjek dalam pergaulan internasional. Perjanjian Westphalia menjadi embrio tata hubungan internasional modern dengan adanya pengakuan terhadap negara sebagai unit politik otonom dengan berprinsip pada kedaulatan (*sovereign state*) dan menjadikannya bagian dari komunitas masyarakat internasional.

Semenjak terbentuknya Perjanjian Westphalia, hubungan negara-negara dilepaskan dari hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara (Bakry, 2017, p. 24).

Perjanjian Westphalia juga mendesain ulang pergaulan internasional dengan pengakuan absah terhadap unit politik negara nasional sebagai subjek utama menggantikan bentuk unit-unit politik sebelumnya (Chatterjee, 2010, p. 1). Karena itu konsep kepentingan nasional tumbuh berkembang beriringan dengan evolusi perkembangan negara modern dan semangat nasionalisme (Frankle, 1970, p. 20). Dengan mengetahui kronologi munculnya konsep kepentingan nasional, maka akan mendapatkan pemahaman bahwasannya kepentingan nasional itu sebagai konsep klasik dalam hubungan internasional karena telah lama muncul jauh sebelum disiplin tersebut terbentuk dan masih tetap relevan digunakan dalam realitas kehidupan modern.

Selama negara tetap eksis dan mejadi unit utama dalam hubungan internasional, maka konsep kepentingan nasional pun mejadi kunci utama untuk memahami dan menjelaskan perilaku internasional dari suatu negara (Perwita & Yani, 2005, p. 35). Kepentingan mejadi justifikasi negara dalam bertindak. Tindakan negara dimanifestasikan dalam sebuah kebijakan. Oleh karenanya, kepentingan nasional mejadi panduan dalam hampir setiap kebijakan luar negeri negara-negara di dunia. Agar dapat membaca dengan jelas wujud konkret dari kepentingan nasional negara, maka diperlukan tahapan interpretasi terhadap konsep tersebut.

Para sarjana hubungan internasional dan politik memberikan interpretasi serbaneka terhadap hakikat kepentingan nasional sehingga belum ada konsesus ajeg dalam menafsirkan konsep tersebut, tetapi dapat mejadi bahan acuan utama untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara (D. Paul, 2018, p. 120). Kepentingan nasional dapat dipahami sebagai motivasi bagi aktor negara dalam mengoperasikan kebijakan luar negerinya (Burchill, 2005). Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai

tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya (Perwita & Yani, 2005). Dengan demikian, kepentingan nasional mengarah pada aspek motivasi dan tujuan terhadap objek yang hendak dicapai oleh negara.

Dalam paradigma utama, motivasi pendorong dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara bersifat material. Bahkan paradigma alternatif konstruktivis konvensional tetap berorientasi pada tujuan pencapaian objek material meskipun faktor ideasional berperan dominan dalam pembentukan kepentingan nasional (Burchill, 2005). Sebab itu, banyak definisi dari kepentingan nasional yang dikaitkan pada pencapaian objek material sebagai bagian dari kebutuhan negara, meskipun tidak menafikan kombinasi elemen non-material dalam kepentingan nasional. Dalam konteks tersebut, kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005). Adapun sejumlah ahli yang lebih menekankan pada aspek-aspek moral, legal, dan ideologis ketika mengkolaborasikan kepentingan nasional (Bakry, 2017, p. 59). Donald E. Nuechterlein menempatkan aspek ideologis sebagai kepentingan nasional yang dimaknai sebagai perlindungan dan pengembangan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara yang disebarkan sehingga dapat diadopsi menjadi nilai universal (Nuechterlein, 1976, p. 248).

Selain itu, apabila ditinjau dalam tingkatan preferensinya, kepentingan nasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital mengacu pada upaya proteksi terhadap integritas teritorial. Sedangkan kepentingan sekunder

dapat berbentuk perlindungan terhadap warga negara di luar negeri (Bakry, 2017, p. 60). Kepentingan nasional juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan periodik, spesifikasi, dan kompatibilitas (Roskin, 1994). Secara periodik atau temporal, kepentingan nasional dibagi ke dalam dua jenis yaitu, kepentingan permanen dan kepentingan temporer. Kepentingan permanen merupakan kepentingan nasional suatu negara dengan durasi waktu jangka panjang. Sebaliknya, kepentingan nasional temporer hanya bersifat sesaat dalam jangka waktu tertentu.

Kepentingan nasional dalam konteks spesifikasi juga terbagi kedalam dua macam, yaitu kepentingan general dan kepentingan spesifik. Kepentingan general adalah kepentingan suatu negara yang ingin diaplikasikan dalam wilayah geografis luas, sedangkan kepentingan spesifik merupakan kepentingan nasional yang cakupan wilayah dan isunya relatif terbatas. Kepentingan nasional dalam kategori kompatibilitas dikategorikan dalam bentuk kepentingan yang bersifat *conflicting* dan komplementer. Kepentingan bersifat *conflicting* adalah kepentingan nasional suatu negara yang dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, sebaliknya kepentingan komplementer justru merupakan kepentingan yang saling melengkapi kepentingan nasional negara lain (Bakry, 2017).

Seiring dengan transformasinya menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tingkat internasional, telah berdampak pada evolusi kepentingan nasional Tiongkok semakin kompleks yang dicirikan adanya perkembangan dinamika politik luar negerinya menyesuaikan dengan perubahan tatanan domestik dan dinamika lingkungan eksternal sebagai dasar kalkulasinya. Kompleksitas kepentingan nasional Tiongkok yang bergantung pada akses lingkungan regional Indo-Pasifik menjadi pemicu

konflik dengan Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang beroperasi di domain lingkungan eksternal telah mengganggu prioritas kepentingan nasional Amerika Serikat. Perilaku politik keduanya dapat bersinggungan karena memasukan entitas geografis tertentu kedalam preferensi kebijakan luar negerinya.

Hakikat pemikiran kepentingan nasional memang koheren dengan komponen geografis (Roskin, 1994, p. 7). Sejalan dengan argumentasi tersebut, regional Indo-Pasifik telah dijadikan preferensi kebijakan luar negeri oleh kekuatan Tiongkok dan Amerika Serikat. Maka sangat logis bilamana terjadi gesekan kepentingan antara keduanya. Sehingga, inferensi dari tragedi politik tersebut ialah kepentingan nasional Tiongkok bersifat *conflicting* karena menjadi variabel yang memengaruhi timbulnya ketegangan dengan pihak lainnya, yaitu dalam konteks ini kekuatan Amerika Serikat. Adanya konflik ditafsirkan sebagai terdapat ketidakselarasan kepentingan nasional. Ketidakselarasan estimasinya bukan atas perbedaan kepentingan, melainkan timbul karena adanya kepentingan yang saling mengganggu atau merugikan. Jadi, keselarasan atau ketidakselarasan tidak didasarkan pada kesamaan atau perbedaan kepentingan. Melainkan yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah apakah kepentingan tersebut dapat mendatangkan keuntungan ataukah justru merugikan bagi pihak lainnya. Dalam perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari kepentingan nasional Tiongkok mengganggu atau merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Perang dagang di level internasional yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat juga menjadi isu sentral di Indo-Pasifik dengan dampaknya yang relatif masif dilatarbelakangi oleh motivasi kepentingan

serupa, yaitu berorientasi pada tujuan ekonomi. Kesamaan tersebut justru menjadi pemicu konflik antar keduanya yang dilatarbelakangi oleh adanya pihak lain dirugikan. Adanya indikasi *unfair trade practice* yang dilakukan Tiongkok telah dianggap sebagai akar penyebab dari defisit perdagangan, yang meliputi praktik : memberikan terhadap subsidi perusahaan domestik, over kapasitas, pencurian terhadap hak kekayaan intelektual, dan pemaksaan transfer teknologi (Mildner & Schmucker, 2019).

Kedua kekuatan juga menyimpan kepentingan serupa dalam aspek kemaritiman yang berambisi untuk mendapatkan kontrol penuh atas zona maritim Indo-Pasifik dengan penggunaan komponen militer. Lebih khusus Tiongkok, rancangan program modernisasi militer memiliki hakikat tujuan untuk memproteksi kepentingan lainnya yang tersebar di sepanjang pesisir Samudra Hindia dan Pasifik. Program modernisasi militer yang menonjol adalah penguatan angkatan laut Tiongkok (Cipto, 2018b, p. 46). Dapat dipastikan proyek utama pembangunan militer hendak membentuk identitas sebagai kekuatan maritim. Dengan armada yang canggih, maka akan memiliki daya jelajah yang jauh. Bilamana itu terjadi, akan dengan mudah mengkoordinasikan militernya untuk melindungi kepentingan di sebrang lautan. Indo-Pasifik menjadi objek kontrol militer Tiongkok karena ruang maritim tersebut dianggap sebagai jalan menuju kemakuran.

Dalam perspektif Amerika Serikat, kehadiran angkatan laut Tiongkok dinilai bertolak belakang dengan kepentingan general Amerika Serikat dalam lingkup kawasan, terutama dalam konteks masalah sengketa teritorial Laut Tiongkok. Kepentingan general Amerika Serikat yang coba diterapkan di Indo-Pasifik adalah mempromosikan nilai-nilai

universal diaktualisasikan dalam visi kawasan seperti bersandar pada prinsip kebebasan dan keterbukaan yang berbasiskan pada hukum internasional demi terciptanya inklusivitas kawasan. Aspek kemaritiman menegaskan krusialnya akses kebebasan navigasi di perairan Indo-Pasifik untuk berpatroli dan melakukan operasi militer Amerika Serikat demi terciptanya ketertiban regional dalam rangka memproteksi kepentingan-kepentingan ekonomi seperti perdagangan bebas dan terbuka (Yadav, 2022, p. 87).

2.3 Asumsi

Berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan dalam kerangka teoritis, maka telah membantu penulis untuk memformulasikan asumsi. Adapun asumsi yang diajukan dalam aktivitas penelitian ini sebagai berikut : **“kebangkitan negara Tiongkok melalui mekanisme intensifikasi program pembangunan di domain internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap eskalasi konflik kepentingan nasional antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di regional Indo-Pasifik”**.

2.4 Kerangka Analisis

